LAPORAN AKHIR PENELITIAN

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMASALAHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGANNYA DI KABUPATEN BOALEMO

KERJA SAMA:
DINAS KOPERINDAG KABUPATEN BOALEMO
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PENELITI

1. Imran Rosman Hambali, S.Pd., SE., M.SA — Ketua Tim
2. Drs. Maha Atma Kadji, M.Si — Anggota
3. Supardi Nani, SE., M.Si — Anggota
4. Idris Niode, SE., M.Si — Anggota
5. Bobby R. Payu, SE., M.Si — Anggota
6. Endi Rahman, SE., M.Si — Anggota

BOALEMO 2013

Kata Pengantar

Segala Puji sepatutnya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul Identifikasi Karakteristik Permasalahan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Dan Alternatif Kebijakan Strategis Pengembangannya Di Kabupaten Boalemo.

Penelitian ini dibiayai dengan dana APBD II SKPD Dinas Koperindag Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan Dengan SK Bupati Boalemo No 280 Tahun 2013 Tentang Identifikasi Karakteristik Permasalahan UMKM dan Alternatif Kebijakan Strategis Pengembangannya.

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga laporan akhir penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, sepatutnyalah kami Tim Peneliti menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang telah menunjuk dan merekomendasikan TIM Pelaksana Penelitian ini;
2. Bupati Boalemo yang mempercayai dan menetapkan Tim Pelaksana Penelitian;
3. Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Boalemo yang telah memfasilitasi TIM Peneliti dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Seluruh Pimpinan SKPD se Kabupaten Boalemo yang telah membantu Tim Peneliti dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Pihak-pihak lainnya yang tak tersebutkan satu demi satu, yang telah membantu baik moril maupun materil dalam penyelenggaraan penelitian ini.

Menyadari keterbatasan dan kekurangan yang mungkin saja terjadi dalam kajian ilmiah ini, sebagai manusia biasa kami dengan segala kerendahan hati membuka diri atas segala kontribusi pemikiran baik berupa saran maupun kritikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Boalemo ke depan khususnya dalam pengembangan sektor UMKM di wilayah ini. Semoga Allah swt, senantiasa meridhoi segala aktivitas kita. Amiin.

Boalemo, Nopember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Dattar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Pemikiran 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Keluaran 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA 4

2.1 Pengertian UMKM 4

2.2 Karakteristik UMKM di Indonesia 6

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMKM 7

BAB III METODOLOGI 12

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 12

3.2 Tipe Penelitian 12

3.3 Sumber Data 12

3.4 Teknik Pengumpulan Data 13

3.5 Teknik Analisa Data dan Tahapan Penelitian 13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 16

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 16

4.1.1 Peta Kabupaten Boalemo 16

4.1.2 Keadaan Administrasi Pemerintahan Daerah 17

4.1.3 Demografi dan Ketenagakerjaan 19

4.1.3 Keadaan Umum UMKM 20

4.2 Hasil Penelitian 26

4.2.1 Karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo..... 27
4.2.2 Permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo dalam upaya pengembangannya..... 48
4.2.3 Langkah strategis upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Boalemo..... 61
4.2.4 Konstruksi model pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo..... 63
4.3 Pembahasan..... 67
BAB V PENUTUP..... 71
5.1 Simpulan..... 71
5.2 Rekomendasi..... 72
DAFTAR PUSTAKA..... 73

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM 5

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2013 18

Tabel 4.2 Jumlah Desa dan Statusnya menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2013 18

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 19

Tabel 4.4 Keadaan UMKM di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013 20

Tabel 4.5 Keadaan UMKM Menurut Klasifikasi Usaha dan Asset serta Omzet di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013 23

Tabel 4.6 Data Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013 24

Tabel 4.7 Sebaran Informan Menurut Usianya 39

Tabel 4.8 Sebaran Informan Menurut Jenis Usahanya 40

Tabel 4.9 Sebaran Informan Menurut Tingkat Pendidikan 41

Tabel 4.10 Sebaran Informan Menurut Pengalaman Wira Usahanya 42

Tabel 4.12 Keadaan Informan Menurut Aksesibilitas Bank 44

Tabel 4.13 Sebaran Informan Menurut Stabilitas Komoditi Usahanya 45

Tabel 4.14 Sebaran Informan Menurut Legalitas Usahanya 47

Tabel 4.15 Sebaran Informan Menurut Perputaran Usahanya 47

Tabel 4.16 Permasalahan UMKM Menurut Informan Penelitian 56

Tabel 4.17 Peran Pemerintah terhadap Pengembangan UMKM Menurut Persepsi Informan 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman:

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Boalemo..... 16

Gambar 4.2 Perkembangan UMKM di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013..... 20

Gambar 4.3 Perkembangan UMKM Menurut Jenis/Klasifikasi Usaha di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 -2013 21

Gambar 4.4 Komposisi Kegiatan UMKM Kabupaten Boalemo Tahun 20012..... 22

Gambar 4.5 Perkembangan Asset dan Omzet UMKM di Kabupaten Boalemo Tahun 2009-2013 23

Gambar 4.6 Penyerapan Naker pada Sektor UMKM di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013 25

Gambar 47 Penyerapan Naker pada Sektor UMKM Menurut Gender di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013 25

Gambar 4.8 Komposisi Penyerapan Naker Pada Umkm Kabupaten Boalemo Berdasarkan Gender Tahun 2012..... 26

Gambar 4.9 Sebaran Informan Menurut Usia 39

Gambar 4.10 Sebaran Informan Menurut Jenis Usahanya 40

Gambar 4.11 Sebaran Informan Menurut Tingkat Pendidikannya 41

Gambar 4.12 Sebaran Informan Menurut Pengalaman Berwirausaha 42

Gambar 4.13 Sebaran Informan Menurut Jumlah Karyawan yang dimiliki..... 43

Gambar 4.14 Sebaran Informan Menurut Aksesibilitas Bank 44

Gambar 4.15Sebaran Informan Menurut Stabilitas Komoditi 46

Gambar 4.16 Sebaran Informan Menurut Lagalitas Usahanya 47

Gambar 4.17 Sebaran Informan Menurut Perputaran Usahanya 48

Gambar 4.18 Permasalahan UMKM Menurut Informan 57

Gambar 4.19 Peran Pemerintah terhadap Pengembangan UMKM Menurut Persepsi Informan 58

Gambar 4.20 Model pengembangan UMKM yang ditawarkan..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Dalam upaya meningkatkan perekonomian baik nasional maupun lokal, maka pengembangan sektor usaha kerakyatan yang seharusnya menjadi pijakan pemerintah guna menopang perekonomian baik di daerah maupun perekonomian nasional. Kebijakan pengembangan sektor usaha kerakyatan yang kondusif akan mampu menciptakan *multiplier effect* seperti peningkatan akumulasi modal, terciptanya nilai tambah, dan yang paling penting adalah peningkatan dan perluasan kesempatan berusaha dan bekerja yang dengan sendirinya akan mengurangi tingkat pengangguran dan selanjutnya secara sinergis mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

Sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merupakan salah satu wujud dari ekonomi kerakyatan, yang sangat potensial untuk dikembangkan mengingat sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya, dan oleh karenanya merupakan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan daripada penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal ini, dalam berita Kementrian Koperasi dan UKM RI (2013) dikemukakan:

> Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sebesar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syariefuddin Hasan, mengatakan jumlah usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta. 99,8 persennya adalah Mikro. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 56 persen. Dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, ekonomi akan semakin baik dan tumbuh.

Halomoan (2002:1), mengemukakan, agar UMKM menjadi pelaku bisnis yang unggul (*market leader*) baik di pasar domestik (*domestic market*) maupun di pasar internasional (*international market*), peranan aparatur pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam membuat kebijakan publik yang kondusif adalah sangat besar sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM. Pengertian daya saing di sini adalah kemampuan

UMKM melakukan kompetisi dengan pelaku ekonomi lain di pasar domestik maupun internasional.

Purnama (2004:1) mengemukakan, bahwa dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Fungsi terakhir dari pemerintah adalah sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM.

Pembangunan daerah yang terencana dengan visi yang jelas akan mampu memenuhi harapan Keyness yakni terciptanya kreasi ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah dan berkurangnya pengangguran. Implikasinya adalah bahwa pembangunan daerah termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membina kemandirian para pelaku bisnis yang mendominasi perekonomian daerah.

Oleh karenanya, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akurat untuk mengidentifikasi karakteristik usaha-usaha skala kecil dan menengah beserta permasalahannya di daerah ini, guna mengkonstruksikan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh dalam upaya pengembangan kapasitas dan kemandirian usaha-usaha tersebut.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka dirasakan sangat perlu untuk mengadakan riset tentang "Identifikasi Karakteristik Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Alternatif Kebijakan Strategis Pengembangannya di Kabupaten Boalemo."

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1) Bagaimana karakteristik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.
2) Permasalahan apa saja yang menjadi kendala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo dalam upaya pengembangannya.
3) Bagaimana langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.
4) Bagaimana konstruksi model pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Untuk mengetahui karakteristik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.
2) Untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi kendala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo dalam upaya pengembangannya.
3) Untuk mengetahui langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.
4) Untuk menemukan konstruksi model pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.

1.4 Keluaran

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) Hasil identifikasi karakteristik permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo.
2) Menemukan model dan langkah strategis dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dibanding dengan kelompok Usaha Besar (UB). Kelompok usaha (UMKM) ini mampu menunjukkan dan mempertahankan eksistensinya terhadap berbagai macam terpaan krisis ekonomi yang sempat melanda perekonomian Indonesia di penghujung era pemerintahan orde baru yang dampaknya masih terasa sampai sekarang ini.

Terkait dengan pengertian UMKM, Pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengemukakan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan kriteria UMKM, Pasal 6 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengemukakan:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Deskripsi tentang kriteria UMKM menurut UU di atas dapat diikhtisarkandan dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Klasifikasi Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. Rp.50 Juta	Maks. Rp.300 Juta
2	Usaha Kecil	Rp.50 Juta < Rp.500 Juta	Rp.300 Juta < Rp.2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	Rp.500 Juta < Rp.10 Miliar	2,5 Miliar < Rp.50 Miliar

Sumber: Data diolah, 2013

2.2 Karakteristik UMKM di Indonesia

Dari segi jumlahnya, UMKM mendominasi jumlah pelaku ekonomi di Indonesia. Adrian (2011) mengemukakan:bahwa UMKM merupakan 99.9% dari total seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Pelaku terbanyak adalah pengusaha mikro dengan jumlah 52.176.795 unit atau 98,88% dari total pengusaha di Indonesia di tahun 2009. UMKM juga menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 96.211.332 orang atau 97,3% dari total tenaga kerja di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak oleh unit usaha mikro yang berjumlah 90.012.694 orang atau 91,03% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Jenis usaha UMKM di Indonesia terdiri dari: (1) pertanian dan yang terkait dengan pertanian (agribisnis), (2) pertambangan rakyat dan penggalian; (3) industri kecil dan kerajinan rumah tangga; (4) listrik non-PLN, (5) konstruksi; (6) perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa komunikasi; (7) angkutan dan komunikasi; (8) lembaga keuangan; dan (9) real estate dan persewaan. Dengan pertumbuhan terbesar pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga; perdagangan besar, eceran, RM dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; dan real estate dan persewaan (Manikmas 2003).

Secara umum, karakteristik UMKM di Indonesia kebanyakan berbentuk industri mikro yang beroperasi pada level rumahan dengan teknologi rendah dan tenaga kerja yang berpendapatan dan berkemampuan rendah (Dirlanudin 2008).

Industri UMKM dengan produk yang sama cenderung berkumpul di satu daerah (*clustering*) karena banyak kemudahan, seperti kemudahan distribusi barang dan pemasaran, yang didapat (Hill 2001).

Sumber modal dari UMKM berasal dari kredit dari bank, dana pribadi, campuran antara keduanya, atau sumber kredit informal lain. (Setyobudi 2007). Berdasarkan jenis penggunaan kredit, prosentase terbesar penggunaan kredit UMKM adalah untuk kredit konsumsi. Walaupun kredit yang dikeluarkan untuk UMKM cukup besar, UMKM yang menggunakan kredit dari bank masih minim. Kebanyakan UMKM masih menggunakan modal dari sumber dana sendiri atau sumber informal seperti rentenir atau kerabat dan teman (Tambunan, 1992).

Dalam hal pemasaran produk, UMKM cenderung bersifat lokal dengan penjualan utama terjadi secara langsung kepada konsumen di pasar tradisional lokal atau penjualan di toko-toko milik sendiri (Dirlanudin 2008).

Sehubungan dengan karalteristik UMKM di Indonesia, Andreas Adi Darmawan, dkk (2010) antara lain memaparkan bahwa karakteristik UMKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Mikro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UMKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

1) Sebagian UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama,
2) Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha,
3) Pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan
4) Terbentuknya UMKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal (di masa krisis).

UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. (http://yudhislibra.wordpress.com/2010/11/22/64/)

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMKM

Upaya pengembangan perekonomian Indonesia khususnya sektor UMKM merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk dilakukan, mengingat bahwa

UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan usaha perekonomian di Indonesia.

Upaya pengembangan UMKM tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab pihak-pihak lain yang terkait, seperti sektor Perbankan, para investor, dan pelaku UB (Usaha Besar), baik dari dalam maupun luar negeri, baik dalam mengatasi masalah pendanaan, penerapan teknologi maupun pengembangan akses pasar.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan sektor UMKM, antara lain akses pembiayaan, akses pasar, kondisi kerja, penerapan teknolgi, akses informasi, promosi usaha baru, peningkatan kualitas produk, pengembangan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Terkait dengan faktor-kator yang mempengaruhi pengembangan UMKM, Darmawan, dkk (2010) mengemukakan, bahwa pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

a. Faktor Internal:

1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut

sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar. Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4) Mentalitas Pengusaha UKM. Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

5) Kurangnya Transparansi. Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

b. Faktor Eksternal

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan

pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3) Pungutan Liar. Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4) Implikasi Otonomi Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5) Implikasi Perdagangan Bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7) Terbatasnya Akses Pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8) Terbatasnya Akses Informasi. Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. (http://yudhislibra.wordpress.com /2010/11/22/64/)

BAB III

METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yakni mulai bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013.

3.2 Tipe Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan mendalam mengenai objek penelitian ini yakni menyangkut karakteristik permasalahan usaha kecil menengah (UMKM) dan upaya merumuskan alternatif kebijakan strategis pengembangannya di Kabupaten Boalemo, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan mendapatkan hubungan antara variabel namun hanya mencari makna (Usman dan Akbar, 2001). Penggambaran secara tepat suatu gejala dalam penelitian kualitatif, pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data saja tetapi harus meliputi analisa data dan interpretasi tentang arti dari data tersebut (Surakhmad, 1985).

3.3 Sumber Data

Arikunto (2007) mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian yakni subyek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keabsahannya, yang terbagi atas:

1) Sumber data primer, dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan yaitu individu yang dianggap dan diyakini mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2) Sumber data sekunder, yakni berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian yang dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta di wilayah Kabupaten Boalemo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

3.4.1 Dokumentasi.

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Maleong, 2007). Studi dokumentasi dilakukan guna memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan karakteristik permasalahan usaha kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo, serta informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4.2 Tehnik Wawancara

Tehnik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam *(indepth interview)* kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)* di mana peneliti sebagai instrumen utama.

3.4.3 Observasi

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek peneltian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik mengenai objek yang diamati. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena tentang karakteristik permasalahan usaha kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.

3.5 Teknik Analisa Data dan Tahapan Penelitian

Menurut Sugiyono (2005) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik permasalahan usaha kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mengedit data penelitian di lapangan dimana ketika data terkumpul atau diperoleh, pengeditan dapat langsung dilakukan.

2) Melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi dalam usaha membuta rangkuman data.
3) Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, informan, serta memilah-milah menjadi kategori tertentu yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria tertentu.
4) Penafsiran data, yaitu setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna.
5) Menguji keabsahan data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas, peneliti melakukan peninjauan ulang di lapangan pada waktu dan situasi berbeda.
6) Mengambil kesimpulan, yaitu dengan berupaya mencari makna data yang dikumpulkan dan dianalisis.

Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pertama Pembentukan kelompok kerja (POKJA).

   Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi permasalahan usaha mikro kecil dan menengah yang pertama dilaksanakan adalah pembentukan Pokja. Kelompok Kerja tersebut dikukuhkan melalui SK Bupati Boalemo. Anggota Pokja terdiri dari Unsur pemerintah yang berwewenang pada kegiatan itu yaitu Dinas Kopperindag dan dari Akademisi Universitas Negeri Gorontalo.
2) Tahap kedua pengumpulan data.

   Tahap Pengumpulan data, dimaksudkan untuk memperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dapat dijadikan data Peneltian Identitikasi Permasalahan UMKM.
3) Tahap ketiga Editing/Analisis Data.

   Tahap pengolahan dan analsis data, yakni data yang telah dikumpulkan dilakukan pengolahan dan analisis berdasarkan format-format yang telah disiapkan.
4) Tahap keempat Penyusunan Dokumen Awal.

Tahap Penyusunan Dokumen Awal pada hakekatnya sudah dilaksanakan dengan kegiatan pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan dimasukkan dalam format, tabel yang disertai dengan Interpestasi data.

5) Tahap kelima Konsultasi publik.

   Tahap Konsultasi Publik dimaksudkan untuk mensosialisasi kepada publik tentang kegiatan Identifikasi permasalahan UMKM. Sosialisasi ini tujuannya untuk menampung perbaikan dan penyempurnaan data.

6) Tahap keenam Penyusunan Dokumen Antara.

   Tahap Penyusunan Dokumen antara adalah merupakan penyempurnaan dari dokumn awal yang telah diperbaiki atas dasar masukan dan informasi dari masyarakat terhadap identifikasi permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo.

7) Tahap ketujuh konsultasi publik.

   Tahap Konsultasi Publik tahap ini adalah memverifikasi data bahwa data tersebut adalah baik benar untuk kemudian disusun sehingga menjadi draft yang disepakati oleh semua pihak terutama pemerintah.

8) Tahap kedelapan Penyusunan Dokumen Akhir.

   Tahap Penyusunan Dokumen Akhir setelah draf kajian disepakati oleh semua pihak maka disusunlah Dokumen akhir dari permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo yang merangkum seluruh data dan informasi dan analisis yang dilakukan kedalam suatu buku kajian permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo.

9) Tahap kesembilan Pelaporan.

   Tahap Penetapan Dokumen akhir yang sudah disusun diajukan kepada ke Pejabat/Instansi pemerintah untuk dapat disetujui dan disahkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Kabupaten Boalemo

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo, dengan luas wilayah sebesar 2.517,36 km^2. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara $00^0$23'55" - $00^0$55'38" LU dan $122^0$01'12" - $122^0$39'17" BT, dengan batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara; sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Boalemo

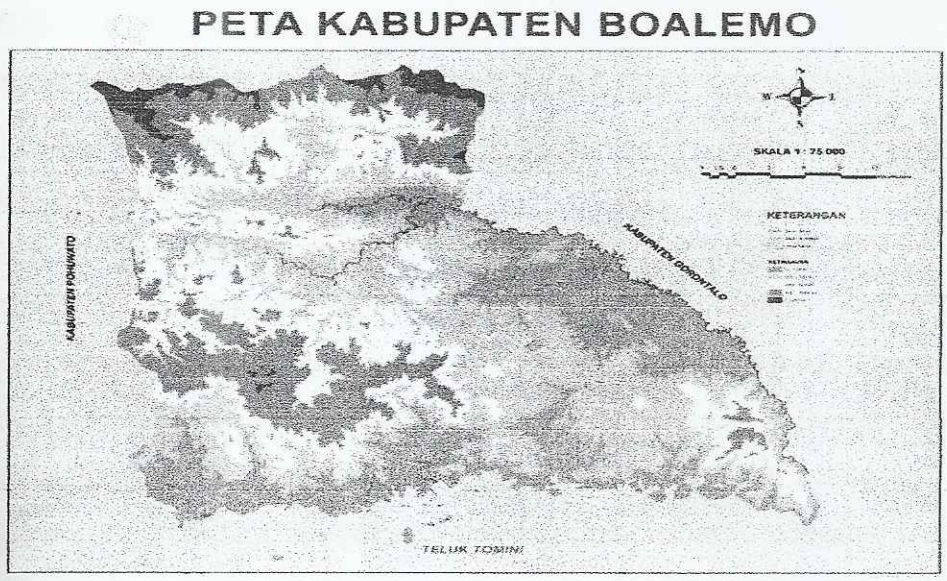

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013

Kabupaten Boalemo memiliki wilayah daratan seluas 2.362,58 km^2 atau 18,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo, di mana sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga kabupaten ini mempunyai potensi sumberdaya pesisir yang sangat kaya ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi pada pantainya. Panjang garis pantai wilayah daratan dan kepulauan kabupaten ini berdasarkan pengukuran dari peta Rupa

Bumi Indonesia digital skala 1 : 50.000 terbitan Bakosurtanal adalah sepanjang kurang lebih 409,195 km pantai selatan yang berhadapan dengan Teluk Tomini.

4.1.2 Keadaan Administrasi Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten Boalemo periode 2012-2017 yang dipimpin oleh Bupati Drs. Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si telah menetapkan Visi dan Misi dan Agenda pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Gorontalo, regional Sulawesi dan Nasional, yakni sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Boalemo sebagai Kabupaten Produktif dan Mandiri.

Misi : Membangun masyarakat Boalemo yang cerdas, berkualitas dan sejahtera.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan agenda pembangunan daerah Kabupaten Boalemo untuk kurun waktu 5 tahun yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM cerdas, berkualitas, beriman dan bertakwa Kepada Tuhan YME.
2. Agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Agenda pengembangan perekonomian dan kemandirian daerah berbasis pertanian dan perikanan kelautan.
4. Agenda pembangunan infrastruktur yang strategis dan fungsional serta merata.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta agenda pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo di tahun 2013 ini didukung oleh 3.835 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didistribusikan ke dalam 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di Kabupaten Boalemo.

Sebaran PNS berdasarkan golongan kepangkatan terdiri: Golongan I sebanyak 80 orang, golongan II sebanyak 1.604 orang, golongan III sebanyak 1.786 orang, dan golongan IV sebanyak 365 orang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa PNS dikabupaten Boalemo didominasi oleh PNS yang memiliki pangkat golongan III disusul PNS golongan II, dan paling sedikit PNS dengan pangkat golongan I.

Dari segi wilayah pemerintahan, Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 wilayah kecamatan yang terbagi ke dalam 82 desa dan 382 dusun, dengan luas wilayah seluruhnya 2.517,36 km^2 .

Tabel 4.1
Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo
Tahun 2013

Kecamatan	Desa	Dusun
Mananggu	9	27
Tilamuta	12	43
Botumoito	9	35
Dulupi	8	46
Paguyaman	22	101
Paguyaman Pantai	8	46
Wonosari	14	84
Kabupaten Boalemo	82	282

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013

Dari tabel di atas nampak bahwa jumlah desa dan dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Paguyaman, yakni 22 desa dan 101 dusun. Kecamatan Dulupi memiliki jumlah desa yang paling sedikit yakni hanya 8 desa, sedangkan jumlah dusun yang paling sedikit dimiliki Kecamatan Mananggu yakni hanya 27 dusun.

Tabel 4.2
Jumlah Desa dan Statusnya menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo
Tahun 2013

Kecamatan	Desa Definitif	Desa Persiapan	UPT	Jumlah
Mananggu	9	3	0	12
Tilamuta	12	2	0	14
Botumoito	9	4	0	13
Dulupi	8	4	0	12
Paguyaman	22	4	1	27
Paguyaman Pantai	8	1	0	9
Wonosari	14	7	3	24
Kabupaten Boalemo	82	25	4	111

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013

Di samping desa definitif, Kabupaten Boalemo memiliki 25 desa persiapan dan 2 UPT yang berada di bawah binaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dari tabel di atas nampak bahwa jumlah usulan desa persiapan paling banyak dari Kecamatan Wonosari sebanyak 7 usulan desa persiapan, dan paling sedikit dari Kecamatan Paguyaman Pantai sebanyak 1 usulan.

4.1.3 Demografi dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di kabupaten Boalemo menurut data tahun 2012 adalah sebanyak 141.030 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 72.114 orang dan perempuan sebanyak 68.916 orang.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boalemo
Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Penduduk			Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Mananggu	463,23	6.694	6.261	12.955	28 org/ km^2
Tilamuta	340,70	14.525	13.991	28.516	84 org/ km^2
Botumoito	521,11	7.851	7.497	15.330	29 org/ km^2
Dulupi	357,00	8.409	8.211	16.620	47 org/ km^2
Paguyaman	215,10	16.393	15.986	32.379	151 org/ km^2
Paguyaman Pantai	136,21	4.075	3.862	7.937	58 org/ km^2
Wonosari	484,01	14.167	13.126	27.293	56 org/ km^2
Jumlah	2.517,36	72.114	68.916	141.030	56 org/ km^2

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013

Kepadatan penduduk kabupaten Boalemo adalah 56 orang per km^2 dengan kecamatan Paguyaman sebagai kecamatan terpadat (151 orang per km^2) dan kecamatan Mananggu sebagai kecamatan terjarang yaitu sebesar 28 orang per km^2.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Boalemo tahun 2012 dirinci menjadi 5 kategori dapat digambarkan sebagai berikut: (1) tidak punya ijazah 44,53%, (2) tamat SD 32,88%, (3) tamat SMP 10,67%, (4) tamat SMA 8,76%, dan (5) tamat Perguruan Tinggi 3,17%.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 61.131 orang dan (2) jumlah penduduk yang mencari

pekerjaan sebanyak 3.036 orang, dengan demikian jumlah angkatan kerja adalah 64,167 orang, sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 26.544 orang.

Dari jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian mencapai 42.183 jiwa, di sektor jasa-jasa sebanyak 7.115 jiwa, dan yang paling sedikit yang bekerja di sektor industri yakni hanya sebanyak 1.345 jiwa.

4.1.3 Keadaan Umum UMKM

Jumlah UMKM yang di Kabupaten Boalemo tahun 2013 sebanyak 6.069 unit usaha, yang didominasi oleh Usaha Mikro yang berjumlah 5.945 Unit, disusul Usaha Kecil sebanyak 115 Unit dan Usaha Menengah sebanyak 9 Unit.

Tabel 4.4
Keadaan UMKM di Kabupaten Boalemo
Tahun 2009 - 2013

TAHUN	JENIS/KLASIFIKASI USAHA			JUMLAH (Jiwa)
	MIKRO (Unit)	KECIL (Unit)	MENENGAH (Unit)	
2009	4.188	55	11	4.254
2010	5.827	69	14	5.910
2011	6.145	69	9	6.223
2012	6.110	175	9	6.294
2013	5.945	115	9	6.069

Sumber: Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan dalam diagram-diagram berikut ini.

Gambar 4.2

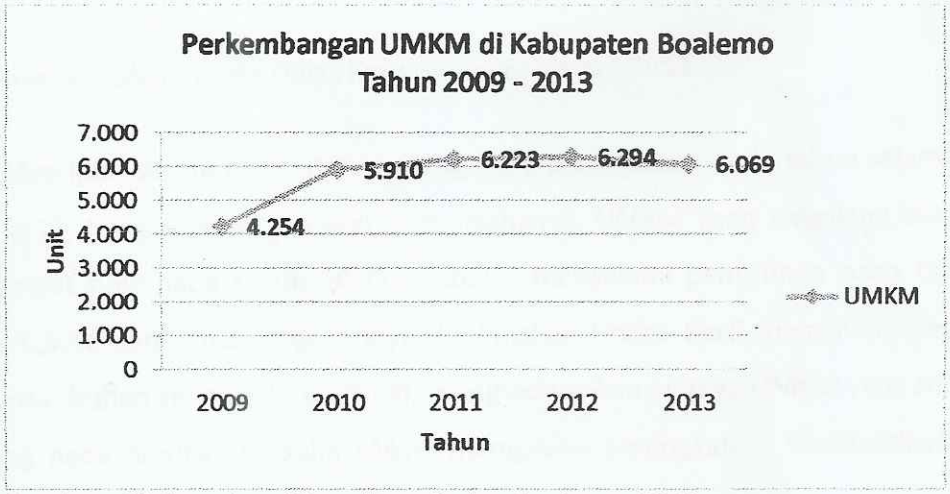

Sumber: Olahan data Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Dari gambar di atas nampak bahwa secara keseluruhan UMKM di Kabupaten Boalemo meningkat jumlahya selama periode tahun 2009 - 2012. Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang tergolong tinggi yakni sebesar 38,93% dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 juga mengalami peningkatan tetapi hanya 5,30% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2012 hanya 1,14% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2013 ini datanya belum dapat dianalisis karena secara final perkembangannya akan nampak pada tahun 2014 nanti. Meskipun mengalami peningkatan, akan tetapi angka pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Boalemo cenderung berkurang. Oleh karenanya, diperlukan formulasi alternatif kebijakan yang tepat dan dapat diaplikasikan untuk mengantisipasi permasalahan ini.

Gambar 4.3

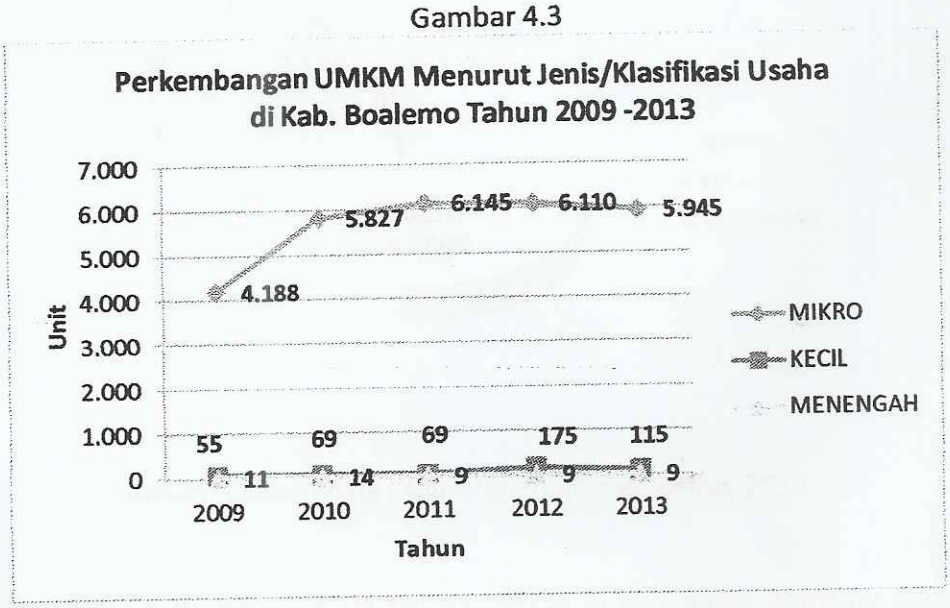

Sumber: Olahan data Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Meskipun secara total UMKM mengalami peningkatan pada tahun selama periode 2009 - 2012, tetapi dilihat dari segi jenis usahanya, UMKM yang tergolong Usaha Mikro yang sempat naik pada tahun 2010dan 2011, mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Usaha Kecil mengalami peningkatan atau pertumbuhan sebesar 153,62%. Ini mengindikasikan adanya UMKM yang sebelumnya tergolong pada klasifikasi Usaha Mikro mengalami peningkatan, klasifikasinya menjadi Usaha Kecil.

Dari data di atas nampak pula bahwa untuk jenis UMKM yang tergolong kelas menengah di Kabupaten Boalemo yang sempat naik di tahun 2010 mengalami penurunan di tahun 2011 dan jumlahnya tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2013. Selama 3 tahun terakhir ini tercatat hanya 9 Usaha Menengah di Kabupaten Boalemo.

Jumlah UMKM di Kabupaten Boalemo sebagaimana daerah lainnya didominasi oleh Usaha Mikro. Sebagai gambaran, komposisi UMKM menurut klasifikasi usaha di Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 dituangkan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.4

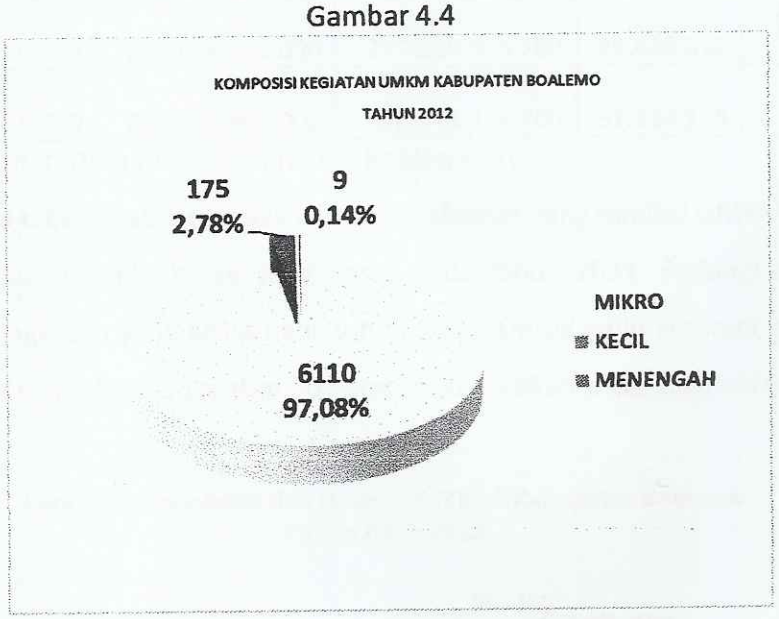

Sumber: Olahan data Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Dari gambar di atas nampak bahwa UMKM di Kabupaten Boalemo tahun 2012 di dominasi oleh Usaha Mikro yakni sebesar 97,08% dari total UMKM, Usaha Menengah hanya sebesar 0,14%.

Dari segi Asset yang dimiliki di luar nilai tanah dan bangunan, UMKM di kabupaten Boalemo mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Total asset yang dimiliki pada tahun 2009 sebesar Rp42.388.886.010,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp225.973.906.000,-. Dari segi omzet usaha, UMKM di Kabupaten Boalemo juga mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp143.097.886.012,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp258.941.158.700.- Selengkapnya data asset dan omzet UMKM di Kabupaten Boalemo dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Keadaan UMKM Menurut Klasifikasi Usaha dan Asset serta Omzet
di Kabupaten Boalemo Tahun 2009 - 2013

TAHUN	UMKM	TOTAL ASSET	TOTAL OMZET	ASSET RATA-RATA	OMZET RATA-RATA
2009	4.254	42.388.886.010	143.097.886.012	9.964.477	33.638.431
2010	5.910	83.345.802.000	159.842.544.500	14.102.505	27.046.116
2011	6.223	222.440.976.524	197.382.572.430	35.744.975	31.718.234
2012	6.294	223.064.531.000	279.619.923.700	35.440.822	44.426.426
2013	6.069	225.973.906.000	258.941.158.700	37.234.125	42.666.199

Sumber: Olahan Data Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Dari data tabel di atas nampak bahwa total asset yang dimiliki UMKM di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2011. Sedangkan total omzet mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya, perkembangan asset dan omzet UMKM di Kabupaten Boalemo diilustrasikan pada diagram berikut.

Gambar 4.5

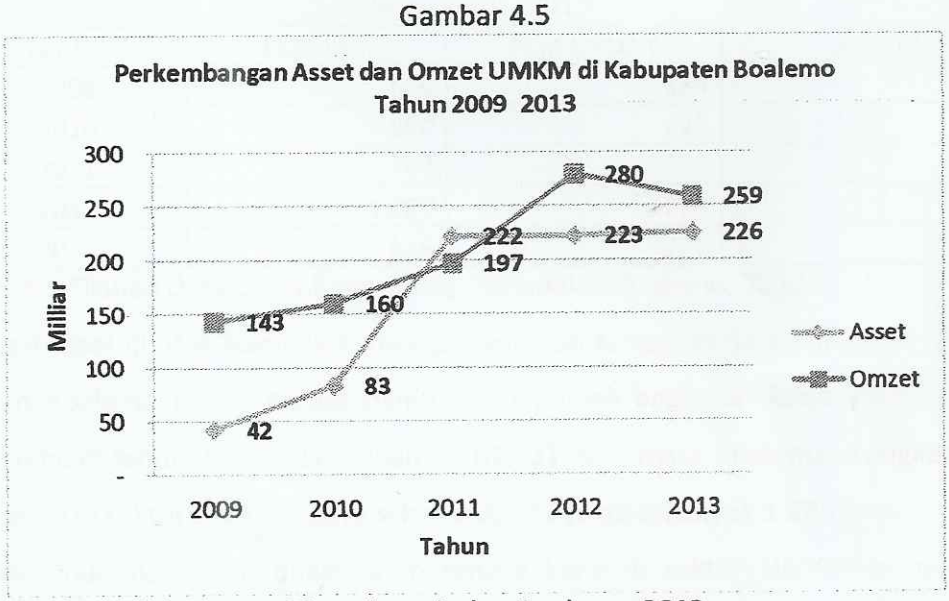

Sumber: Olahan Data Dinas Koperindag Boalemo, 2013

Dari diagram di atas nampak bahwa total asset yang dimiliki UMKM di Kabupaten Boalemo mengalami pertumbuhan selama tahun 2010 s/d tahun 2013. Pada tahun 2010 total asset mengalami pertumbuhan sebesar 96,62% dari tahun sebelumnya, tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yakni 166,89% dari tahun sebelumnya, tahun 2012 hanya mencapai pertumbuhan sebesar 0,28%, dan tahun 2013 hanya mencapai 1,30%.

Total omzet yang dicapai oleh UMKM di Kabupaten Boalemo juga menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2010 total omzet yang dicapai mengalami pertumbuhan sebesar 11,70% dari tahun sebelumnya, tahun 2011 meningkat sebesar 23,49% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2012 meningkat tajam yakni 41,66% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013 capaian total omzet belum dapat dihitung mengingat datanya belum final, tetapi untuk sementara dapat dilihat total omzetnya menurun yakni -7,395% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.6
Data Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM di Kabupaten Boalemo
Tahun 2009 - 2013

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2009	606	130	736
2010	550	129	679
2011	787	245	1.032
2012	1.007	279	1.286
2013	816	227	1.043

Sumber: Olahan Data Dinas Koperindag Kabupaten Boalemo, 2013

Dari tabel di atas nampak bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Kabupaten Boalemo masih sangat minim. Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten ini di tahun 2012 yakni sebanyak 61.131 jiwa, maka prosentase angkatan kerja yang terserap di sektor UMKM hanya sebesar 2,10% yakni sebanyak 1.286 jiwa.

Meskipun demikian, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini mengalami pertumbuhan sejak tahun 2011 meskipun tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar -7,74% dari tahun 2009. Tahun 2011 penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 51,99% dari tahun sebelumnya, tahun 2012 tumbuh sebesar 24,61%, untuk tahun 2013 merosot tajam yakni -18,90%.

Gambar 4.6

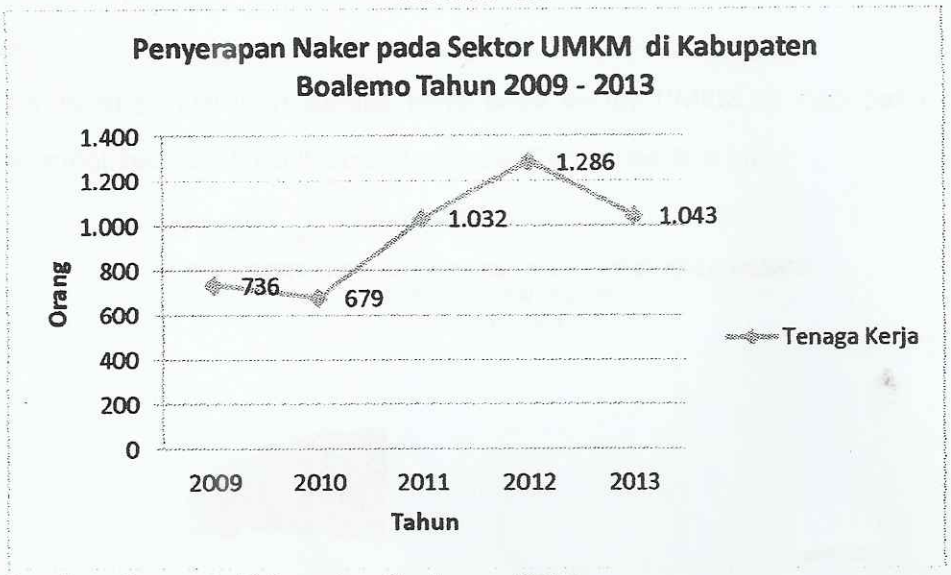

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013.

Dari gambar di atas jelas bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM mengalami peningkatan selama periode tahun 2010 s/d tahun 2012.

Gambar 47

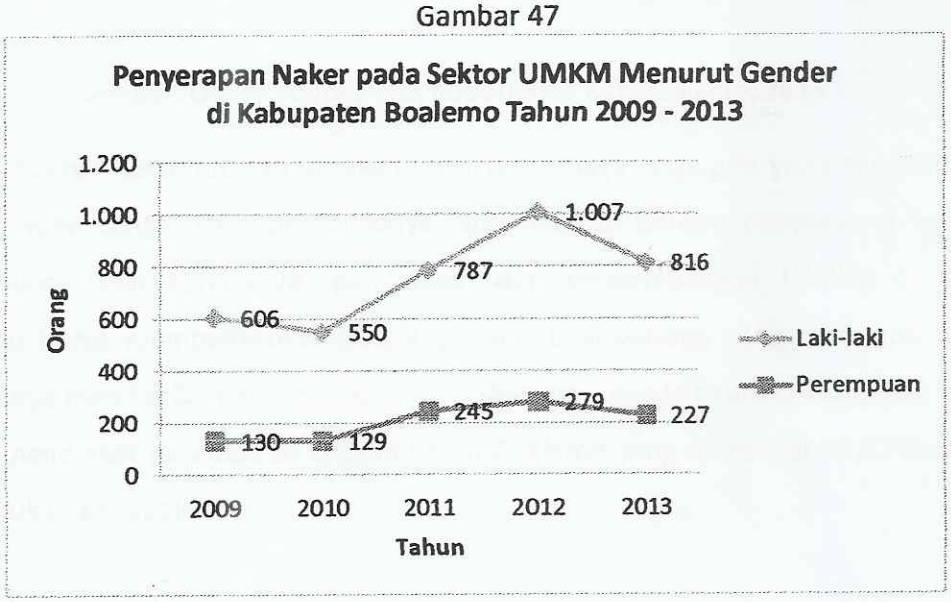

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2013.

Dilihat dari faktor gender penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Kabupaten Boalemo didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Selama periode tahun 2010 s/d 2012 penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM baik tenaga kerja laki-laki maupun

perempuan mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013 keduanya mengalami penurunan.

Komposisi penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Kabupaten Boalemo menurut Gender secara jelas diilustrasikan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.8

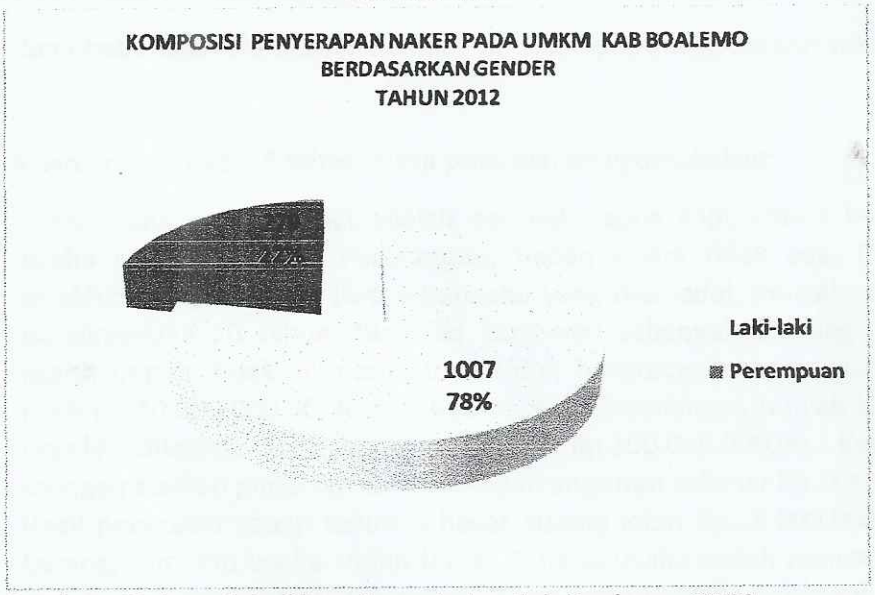

Sumber: Olahan data Dinas Koperindag Kab Boalemo, 2013

Diagram tersebut menunjukan dominasi tenaga kerja pria yang terserap di sektor UMKM, yang sangat jauh perbedaanya dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja perempuan. Oleh karenanya, pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo harus memperhatikan faktor gender. Usaha-usaha yang dibangun dan dibina seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan, mengingat jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Boalemo yang mencapai 48,87% dari jumlah penduduk di Kabupaten ini.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan data temuan lapangan baik berupa hasil wawancara dengan para informan penelitian maupun berbagai data dokumentasi yang mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi lokus penelitian ini meliputi karakteristik dan permasalahan UMKM dalam upaya

pengembangannya, langkah strategis upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dan konstruksi model pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo.

4.2.1 Karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo

Dalam upaya mendeskripsikan karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo, terlebih dahulu dipaparkan data temuan lapangan terkait dengan karakteristik UMKM tersebut, berupa pernyataan beberapa informan penelitian yang sempat diwawancarai yakni sebagai berikut.

Bapak Avian Pomalango, 26 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Jenis usaha yang dimiliki adalah penjual daging sapi, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, badan usaha tidak ada. Pendidikan terakhir SMA, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha 10 tahun. Memiliki karyawan sebanyak 3 orang. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kurang lebih Rp.10.000.000,00. Akses kepada perbankan lancar. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank sebanyak Rp.100.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman lancar dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,00. Hasil penjualan setiap tahun sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Telah memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan sudah baik, ada pembagian tugas yang jelas. Melakukan aturan perburuhan yakni AKSES. Persyaratan legalitas yang dimiliki ada yakni NPWP. Perputaran usaha tergolong tinggi. Melakukan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

Bapak Amir saleh, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Jenis usaha yang dimiliki usaha jasa warnet. Status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, badan usaha tidak ada. Tingkat pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 2 tahun. Memiliki karyawan sebanyak 1 orang. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha sebesar Rp.18.000.000,00. akses kepada perbankan belum ada. Hasil penjualan setiap tahun rata-rata Rp.84.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, Tempat usaha juga sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan, belum melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Telah memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Persyaratan legalitas yang dimiliki ada yakni NPWP. Perputaran usaha tergolong tinggi. Telah melakukan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

Bapak Arif Bolio, 58 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki ialah depot bensin, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha 1 tahun, tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha Rp. 500.000,- Akses kepada perbankan tidak ada. Akses ke lembaga keuangan non bank lancar (koperasi harian). Jumlah kredit yang pernah diterima dari non bank Rp 500.000,00. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 3.000.000.- Jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti, Tempat usaha sudah menetap. Tidak melakukan administrasi keuangan. Perputaran usaha tergolong rendah.

Ibu Erni Adam, 33 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha warung/rumah makan, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 4 tahun. Tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 5.000.000,00 hasil penjualan setiap tahun kurang lebih Rp. 5.400.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Perputaran usaha tergolong rendah.

Ibu Fatma G. duda, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik, Perorangan, Bentuk badan usaha CV, Pendidikan terakhir SMA, memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 25 tahun. Tidak memiliki karyawan, kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 5.000.000,00. Akses kepada perbankan lancar, juga akses ke lembaga keuangan non bank lancar. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.5.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp 400.000,00/bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 5.400.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Perputaran usaha tergolong rendah.

Bapak Firda Duda, 50 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, Badan usaha tidak ada, Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha 2 tahun, tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp.3.000.000,00. Akses kepada

perbankan ada. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.6.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp.404.000,00. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 7.200.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu-waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. belum melakukan administrasi keuangan. belum melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Perputaran usaha tergolong rendah.

Ibu Hayati Yusuf, 38 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, badan usaha belum ada, tidak tamat SD, jiwa wirausaha cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha 4 tahun. karyawan tidak ada, akses kepada perbankan dan non bank tidak ada, sulit. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 6.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu-waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan, juga belum melakukan manajemen keuangan.

Bapak Herman Saleh, 38 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha warung/rumah makan, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tidak berbadan usaha, Pendidikan terakhir SMP, jiwa wirausaha cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha sudah 20 tahun. Tidak memiliki karyawan, kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp.5.000.000,00. Akses kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank tidak ada. Belum pernah menerima bantuan kredit dari bank. Hasil penjualan setiap tahun Rp.7.200.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Perputaran usaha tergolong sedang.

Ibu Hj. Erni Monoarfa, 64 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir KPG (kursus pendidikan guru), memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai. Pengalaman dalam berwirausaha selama 6 tahun. Tidak memiliki karyawan. akses kepada perbankan cukup baik, jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.10.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp.518.700,00. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 6.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu-waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur.

Bapak Irawanto Tarera, 36 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki ialah jasa angkutan bentor, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMA, memiliki jiwa wirausaha yang kurang memadai, pengalaman dalam berwirausaha 3 tahun, tidak memiliki karyawan, kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kurang lebih Rp 150.000,00. Akses kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank tidak ada. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 7.200.000,00.

Ibu Isma Ladiku, 35 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, bentuk badan usaha CV, pendidikan terakhir SMP. Memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 3 tahun. Karyawan tidak ada, kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 1.000.000,00. Akses kepada perbankan baik, jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.75.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp 2.350.000. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 12.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur.

Ibu Jasni Saleh, 29 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 8 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan lancar, jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.20.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman sebesar Rp.1.300.000,00. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 12.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Perputaran usaha tergolong sedang.

Ibu Maemunah Suleman, 32 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, depot dan gorengan, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan berbadan usaha CV. Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha 5 tahun. Tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 5.000.000,00. Akses kepada perbankan lancar, jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.20.000.000,00. Kemampuan mengembalikan

pinjaman Rp 1.234.000/bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 46.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan.

Bapak Rahmat Saleh, 25 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki ialah penjualan rempah-rempah (rica), status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMK, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 7 tahun, memiliki karyawan sebanyak 1 orang. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 12.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Persyaratan legalitas yang dimiliki NPWP. Perputaran usaha tergolong sedang.

Ibu Salma Abdurahman, 65 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil dan menjahit, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, bentuk badan usaha CV, Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang memadai cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 6 tahun. Tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 450.000,00. Akses kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank tidak ada. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 5.400.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetapdan tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Perputaran usaha tergolong sedang.

Bapak Sance Husain, 29 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai cukup memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 5 tahun. Tidak memiliki karyawan. kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 4.000.000,00. Akses kepada perbankan ada tapi cukup sulit. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp 5.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp. 520.00,00/bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 5.300.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Perputaran usaha tergolong rendah.

Ibu Santi Abdullah, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha, Pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang masih kurang, memiliki pengalaman dalam berwirausaha baru 3 bulan. Belum memiliki karyawan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 1.200.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap.

Ibu Sartin Kasin, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki ialah Pedagang telur, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank lancar. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.20.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp 1.500.000,00/bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 12.700.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap.

Ibu Suarni Tialo, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMP. memiliki jiwa wirausaha yang memadai cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Tidak memiliki karyawan. kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 5.000.000,00. Akses kepada perbankan dan ke lembaga keuangan non bank tidak ada. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 6,000.000,00.

Bapak Sudirman Tambiyo, 30 Tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki ialah Petani jagung, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 18 tahun. Memiliki karyawan sebanyak 12 orang. kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 12.000.000,00. Akses kepada perbankan tidak ada. Hasil penjualan setiap tahun Rp 11.000.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Perputaran usaha tergolong sedang.

Bapak Tanwir Mapato, 45 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil dan depot, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha. Pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai cukup memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Tidak memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 5.000.000,00. Akses kepada perbankan lancar,
jumlah kredit yang pernah diterima dari bank Rp.120.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp. 2.200.000,00/bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 12.000.000,00, Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur.

Ibu Yanti Adam, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan tidak berbadan usaha, pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 1 tahun 3 bulan, belum memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha kurang lebih Rp 4.500.000,00. Akses kepada perbankan ada. Jumlah kredit yang pernah diterima Rp.30.000.000,00. Kemampuan mengembalikan pinjaman Rp 1.751.000,00/Bulan. Hasil penjualan setiap tahun Rp. 5.400.000,00. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan dan manajemen keuangan.

Bapak Ajan Ali, 33 tahun, Desa botumoito, antara lain mengemukakan:

Jenis usaha kami adalah kios kecil, yang merupakan milik sendiri dan bersifat perorangan. Pendidikan terakhir kami adalah SMP. Jiwa wirausaha yang yang dimiliki cukup memadai, dan pengalaman dalam berwirausaha sukup lama yakni selama 8 tahun. Usaha kami belum memiliki karyawan karena usahanya yang masih kecil. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di bawah Rp.50.000.000,- Akses kepada perbankan maupun ke lembaga keuangan non bank selama ini baik baik saja. Kemampuan mengembalikan pinjaman selama ini sangat baik dan tidak menunggak. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Administrasi keuangan belum dilakukan. Juga sistem akuntansi belum diterapkan. Keuangan keluarga dan keuangan usaha belum dipisahkan dan neraca usaha belum pernah dibuat. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan masih kurang baik. Persyaratan legalitas

belum ada. Perputaran usaha masih tergolong rendah. Manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis sudah dilakukan. Kemampuan menyerap dana/investasi masih rendah. Kami bersedia menerima bimbingan dari pihak yang berkompeten.

Bapak Amir Usman, 45 tahun, Tilamuta, antara lain mengemukakan:

Jenis usaha kami pedagang Ikan Tuna dengan status kepemilikan usaha sebagai pemilik perorangan. Pendidikan terakhir kami SMA, pengalaman dalam berwirausaha sudah 9 tahun. Karyawan yang ada sebanyak 5 orang, sudah terlatih tapi belum cukup terdidik dengan baik. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di bawah Rp.50.000.000,- Akses kepada perbankan cukup lancar sedangkan akses ke lembaga keuangan non bank Tidak lancar. Jumlah kredit yang pernah diterima dari bank sebesar Rp.10.000.000,- dan kemampuan mengembalikan pinjaman selama ini sangat baik/lancar. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu sesuai dengan musim ikan tuna. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap dan tempat usaha sudah menetap. Administrasi keuangan belum dilakukan, manajemen keuangan juga belum dilakukan. Keuangan keluarga dan keuangan usaha belum dipisahkan. Rencana usaha selama ini belum dibuat. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan sudah cukup baik tapi belum modern. Belum ada pembagian tugas yang jelas. Aturan atau pengelolahan dan organisasi perburuhan belum dilakukan. Persyaratan legalitas perizinan belum ada. Perputaran usaha selama ini menurut kami sedang-sedang saja. Manajemen usaha dengan baik belum dilakukan tetapi sementara direncanakan.

Bapak H. Naki, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:antara lain:

Jenis usaha kami adalah Jasa perbengkelan, Status kepemilikan usaha adalah Pemilik Perorangan, tingkat pendidikan hanya SMP, pengalaman wira usaha sudah memadai yakni selama 13 tahun. Kami belum memiliki karyawan. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Di bawah Rp.50.000.000,- akses kepada perbankan belum ada, juga ke lembaga keuangan non bank belum ada. Belum pernah memperoleh kredit dari bank. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya, kurang dari Rp. 30.000.000,-. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Juga tempat usaha sudah menetap. Administrasi keuangan belum dilakukan, juga belum melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Keuangan keluarga dan keuangan usaha sudah dipisahkan. Tetapi neraca usaha belum dibuat. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan masih kurang baik. Belum ada pembagian tugas yang jelas. Aturan atau pengelolahan dan organisasi perburuhan belum ada. Persyaratan legalitas sudah ada yakni Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha

tergolong sedang. Kami telah melakukan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis. Kami mampu menyerap dana/investasi jika memang tersedia, dan bersedia mendapatkan bimbingan.

Bapak Hadju saipi, 36 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha kami ialah petani jagung, status kepemilikan usaha adalah pemilik, perorangan. Tingkat pendidikan terakhir SMP, Jiwa wirausaha yang dimiliki sangat memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Kami memiliki karyawan dengan jumlah yang tidak menetap. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di bawah Rp.50.000.000,- Akses kepada perbankan dan lembaga non bank cukup baik. Kemampuan kami mengembalikan pinjaman selama ini sangat baik. Hasil penjualan setiap tahun Tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, tempat usahanya juga sudah menetap. Kami belum melakukan administrasi keuangan. Manajemen keuangan juga belum dilakukan. Keuangan keluarga dan keuangan usaha tidak dipisahkan. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan sudah baik tetapi belum dengan cara modern. Ada pembagian tugas dalam manajemen usaha. Aturan atau pengelolahan dan organisasi perburuhan belum dilakukan. Juga legalitas perizinan belum dilakukan. Perputaran usaha masih tergolong rendah. Perencanaan bisnis sudah dilakukan. Kemampuannya menyerap dana/investasi bisa sampai Rp100 Juta. Kami mau menerima bimbingan jika tersedia.

Bapak Kadir Saipi, 37 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha kami adalah Usaha warung/rumah makan Nasi Kuning, status kepemilikan usaha Pemilik, Perorangan, pendidian terakhir SMP. Jiwa wirausaha cukup Memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Karyawan belum ada. Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kurang dari Rp.10.000.000,-. Akses kepada perbankan maupun lembaga keuangan non bank belum ada. Hasil penjualan setiap tahun Tidak menentu pendapatannya, biasanya sekitar Rp. 2.550.000/bulan. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap, juga tempat usahanya sudah menetap. Administrasi keuangan belum dilakukan. Manajemen keuangan juga belum dilakukan. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan masih kurang baik. Pembagian tugas belum ada. Aturan pengelolahan organisasi perburuhan belum ada. Persyaratan legalitas yang dimiliki adalah Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tergolong Sedang. Perencanaan bisnis belum ada. Kami bersedia dibimbing.

Bapak Martin Abdul, 37 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha yang digeluti yakni Usaha Toko sembako, Status kepemilikan usaha sebagai Pemilik, Perorangan, tingkat pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 7 tahun. Karyawan belum ada. Kekayaan usaha bersih, Di bawah Rp. 100 Juta. Akses kepada perbankan dan non bank sangat baik. Kemampuan mengembalikan pinjaman cukup baik. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti. Tempat usahanya sudah menetap. Administrasi keuangan belum dilaksanakan. Manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur juga belum dilaksanakan. Belum memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan apakah belum cukup teratur, karena pembagian tugas tidak ada. Persyaratan legalitas yang dimiliki adalah Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tidak menentu dan tergolong rendah. Kemampuan menyerap dana/investasi cukup.

Bapak Muhammad Ali, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha kami adalah depot bensin, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik, Perorangan, tingkat pendidikan terakhir SMP, jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 7 tahun, tidak memiliki karyawan, akses kepada perbankan sangat baik, akses ke lembaga keuangan non bank Baik. Kemampuan mengembalikan pinjaman cukup baik. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi. Persyaratan legalitas yang dimiliki adalah Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tidak menentu dan tergolong rendah.

Ibu Ratna Akuba, 50 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis-jenis usaha warung/rumah makan, status kepemilikan usaha Pemilik, Perorangan, tingkat pendidikan terakhir SMA, memiliki jiwa wirausaha yang Memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 6 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank sangat sulit. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya, biasanya Rp. 3.600.000. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu-waktu berganti. Tempat usaha sewaktu-waktu berpindah. Administrasi keuangan belum dilakukan. Manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur juga belum dilakukan. Legalitas yang dimiliki Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tegolong sedang.

Bapak Ridwan Dahiba, 35 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Jenis usaha Kopra, status kepemilikan usaha sebagai pemilik, Perorangan, tingkat pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha 5 tahun, jumlah karyawan 3 orang. Hasil penjualan setiap tahun ± Rp. 50.000.000. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha pun sudah menetap. Manajemen keuangan masih kurang baik. Telah memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan sudah cukup baik, ada pembagian tugas yang jelas. Perputaran usaha tegolong sedang. Melakukan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

Bapak Juma Pomalingo, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Jenis usaha yang dimiliki pedagang Rempah-Rempah, status kepemilikan usaha pemilik perorangan, tingkat pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang masih cukup memadai, pengalaman dalam berwirausaha 3 tahun. Belum memiliki karyawan. Hasil penjualan setiap tahun ± Rp. 20. 000.000. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Telah melakukan administrasi keuangan, manajemen keuangan dengan menerapkan kurang sempurna. Telah memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan sudah baik, ada pembagian tugas yang jelas. Telah melakukan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

Bapak Rinto Adam, 40 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Jenis usaha yang dimiliki usaha batu bata, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik, Perorangan, tingkat pendidikan terakhir SD, jiwa wirausaha yang dimiliki memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan dan non bank sangat baik. Kemampuan mengembalikan pinjaman cukup baik.Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi sewaktu waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Perputaran usaha tidak menentu dan tergolong rendah.

Ibu Rusni, 45 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Jenis usaha yang dimiliki Usaha kios kecil, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, tingkat pendidikan terakhir S1, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun, belum memiliki karyawan. Akses kepada perbankan sangat baik. Kemampuan mengembalikan pinjaman cukup baik. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu

waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Kemampuan menyerap dana/investasi cukup.

Bapak Umar Ibrahim, 34 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki petani coklat/kakao, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 10 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan sangat baik. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya, jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Belum melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Manajemen dan organisasi usaha masih kurang baik, pembagian tugas tidak ada. Persyaratan legalitas yang dimiliki, Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tidak menentu dan tergolong rendah.

Ibu Yayun Lumula, 40 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki Usaha Toko, status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, pendidikan terakhir SD, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, pengalaman dalam berwirausaha selama 5 tahun. Tidak memiliki karyawan. Akses kepada perbankan sangat baik, kemampuan mengembalikan pinjaman cukup baik, hasil penjualan setiap tahun tidak menentu dan tergolong rendah. Jenis barang/komoditi usaha sewaktu waktu berganti. Tempat usahanya sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur belum dilaksanakan. Manajemen dan organisasi usaha yang dilakukan masih kurang baik, pembagian tugas yang jelas tidak ada. Persyaratan legalitas yang dimiliki Izin Tempat Usaha. Perputaran usaha tidak menentu dan tergolong rendah.

Bapak Zainudin Pomalingo, 25 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Jenis usaha yang dimiliki Usaha warung/rumah makan Nasi Kuning, Status kepemilikan usaha sebagai Pemilik Perorangan, pendidikan terakhir SMP, memiliki jiwa wirausaha yang memadai, memiliki pengalaman dalam berwirausaha Selama 6 tahun. Belum memiliki kayarwan. Hasil penjualan setiap tahun tidak menentu pendapatannya, biasanya Rp. 2.550.000. Jenis barang/komoditi usaha sudah tetap. Tempat usaha sudah menetap. Belum melakukan administrasi keuangan. Persyaratan legalitas yang dimiliki Izin Tempat Usaha.

Setelah memaparkan data hasil wawancara sebagaimana telah dilakukan di atas, maka langkah selanjutnya adalah pereduksian data hasil wawancara tersebut. Reduksi data dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang akan menunjukkan karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo sesuai permasalahan penelitian yang akan dijawab pada bagian ini.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, teridentifikasi beberapa aspek yang menjadi gambaran karakteristik pelaku usaha di Kabupaten Boalemo. Aspek pertama yang penting untuk dianalisis adalah aspek usia pelaku usaha. Dari 37 informan penelitian yang berhasil diwawancarai, 13 orang (35,13%) yang berusia di antara 25 s/d 34 Tahun, dan 18 orang (48,65%) yang berusia antara 35 s/d 44 Tahun. Selebihnya 6 orang (16,22%) yang berusia 45 Tahun ke atas. Secara detail, klasifikasi informan sebagai pelaku usaha divisualisasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Sebaran Informan Menurut Usianya

NO.	PENGALAMAN	JUMLAH	%
1	25 S/D 34 Tahun	13	35,14
2	35 s/d 44 Tahun	18	48,65
3	45 Tahun ke atas	6	16,22
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.9

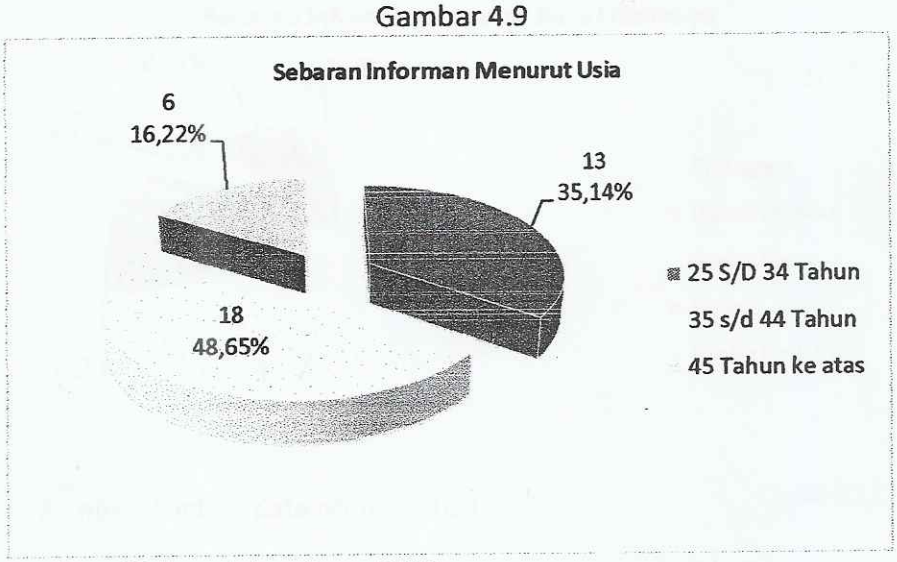

Sumber: Olahan data primer, 2013.

Aspek berikutnya adalah Jenis/bidang usaha yang digeluti para pelaku usaha. Dari wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Boalemo, teridentifikasi 5 bidang usaha yang digeluti oleh pelaku usaha yang diwawancarai yakni usaha kios/pertokoan, rumah makan, pedagang, usaha jasa, dan petani.

Secara detail, jenis/bisang usaha tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Sebaran Informan Menurut Jenis Usahanya

NO.	JUNIS USAHA	JUMLAH	%
1	Pedagang	25	67,57
2	Rumah Makan	5	13,51
3	Usaha Jasa	3	8,11
4	Usaha Batu Bata	1	2,70
5	Petani	3	8,11
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013.

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram pada halaman berikut. Dari diagram tersebut nampak bahwa dari 37 informan/pelaku usaha yang diwawancarai didominasi oleh pedagang yakni sebanyak 25 orang (67,57%), disusul oleh usaha rumah makan sebanyak 5 orang (13,51%). Selebihnya adalah usaha jasa dan petani masing-masing sebanyak 5 orang (8,11%) serta usaha batu bata yang hanya 1 orang (2,70%).

Gambar 4.10

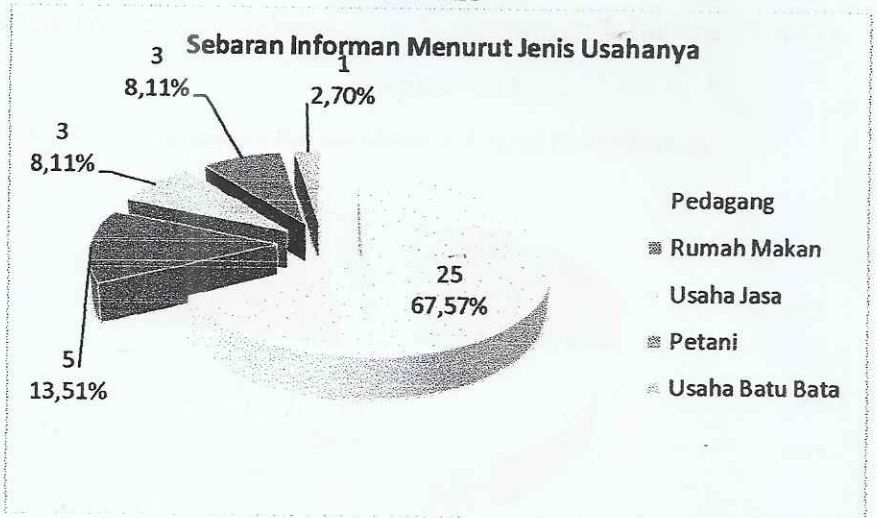

Sumber: Olahan data primer, 2013

Barang atau komodi yang dijual oleh antara lain sembako, kopra, ikan tuna, rempah-rempah, daging sapi, telur dan lain-lain. Usah jasa meliputi usaha jasa warnet, jasa angkutan bentor, dan Jasa perbengkelan. Sedangkan petani yang ada terdiri dari petani jagung dan coklat/kakao.

Dilihat dari aspek status kepemilikan usaha, seluruh informan selaku pelaku usaha menyatakan sebagai pemilik usaha yang digeluti. Tidak ditemukan yang berstatus sebagai penggarap. Dari segi badan usaha usaha, di antara 37 informan yang ada, hanya 4 orang (10,81%) memiliki badan usaha yakni dalam bentuk CV.

Tabel 4.9
Sebaran Informan Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SD	9	24,32
2	SMP	20	54,05
3	SMA	7	18,92
4	S1	1	2,70
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Dari segi latar belakang pendidikan, informan penelitian memiliki latar pendidikan terakhir yang variatif yakni dari tingkat SD, SMP, SMA, dan S1 sebagaimana divisualisasikan pada tabel halaman sebelumnya.

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram pada halaman berikut.

Gambar 4.11

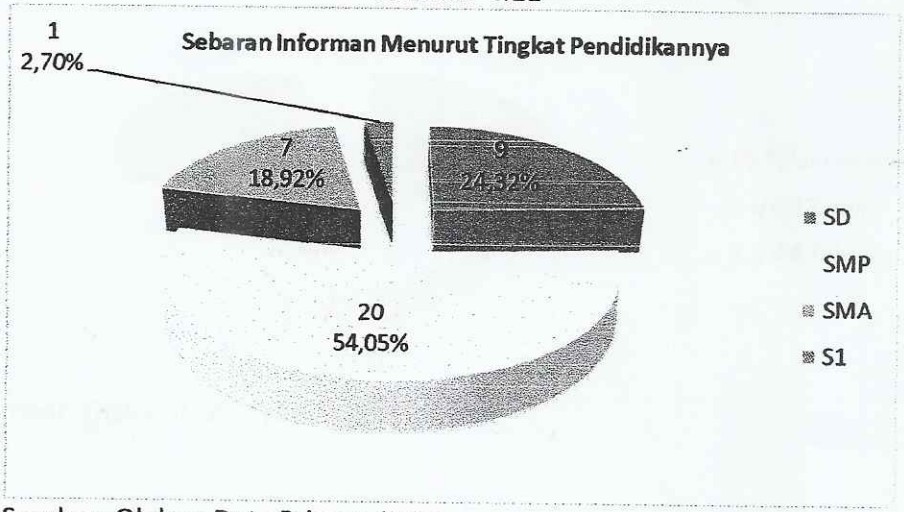

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Dari gambar tersebut nampak bahwa informan penelitian didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP sebanyak 20 orang (54,05%), disusul yang berpendidikan SD sebanyak 9 orang (24,32%), berpendidikan SMA sebanyak 7 orang (18,92%) dan berpendidikan S1 sebanyak 1 orang (2,70%).

Data tersebut menunjukkan bahwa SDM para pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Dalam kondisi yang demikian ini, program pelatihan dan pengembangan SDM pelaku usaha seharusnya dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menopang percepatan pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Informan penelitian pada umumnya memiliki jiwa wirausaha yang memadai, dengan pengalaman berusaha/berwira usaha yang bervariasi. Selengkapnya data pengalaman wira usaha para informan penelitian digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Sebaran Informan Menurut Pengalaman Wira Usahanya

NO.	PENGALAMAN	JUMLAH	%
1	10 Tahun ke atas	13	35,14
2	5 s/d 9 Tahun	14	37,84
3	1 s/d 4 Tahun	10	27,03
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan dalam diagram pada halaman berikut.

Gambar 4.12

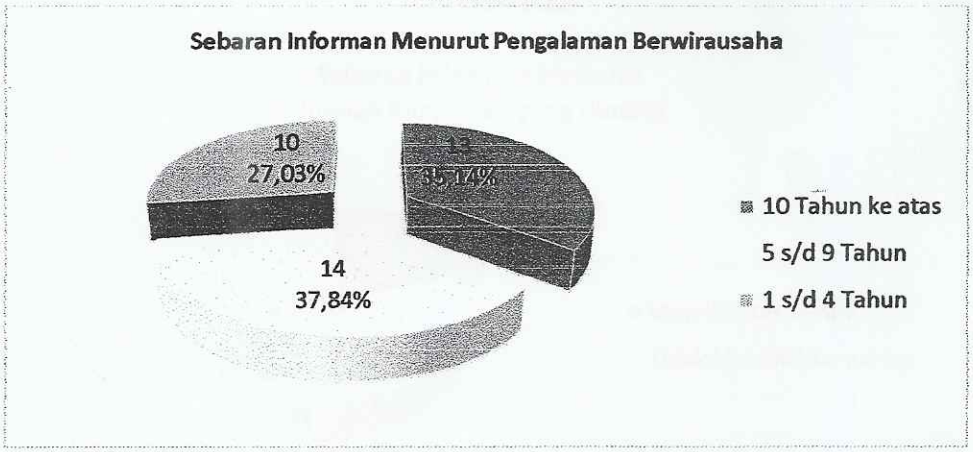

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Diagram tersebut menunjukkan bahwa informan penelitian selaku pelaku usaha UMKM didominasi oleh mereka yang memiliki pengalaman wira usaha selama 5 s/d 9 tahun yakni sebanyak 14 orang (37,84%), disusul yang memiliki pengalaman selama 10 tahun ke atas sebanyak 13 orang (35,14%), dan terakhir dengan pengalaman selama 1 s/d 4 tahun sebanyak 10 orang (27,03%). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian memiliki pengalaman berusaha di atas lima tahun. Pengalaman berusaha merupakan aspek pendukung bagi upaya pengembangan UMKM ke depan.

Aspek lainnya adalah keterlibatan sumber daya manusia (karyawan) yang terlatih dan terdidik dalam usahanya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata para pelaku usaha mengelola sendiri usahanya tanpa dibantu atau mempekerjakan karyawan. Gambaran keterlibatan karyawan dalam usaha para informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Sebaran Informan Menurut Jumlah Karyawan yang Ada

NO.	PENGALAMAN	JUMLAH	%
1	Memiliki Karyawan	7	18,92
2	Tidak Memiliki Karyawan	30	81,08
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan dalam diagram pada halaman berikut.

Gambar 4.13

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Diagram tersebut menunjukkan bahwa keadaan informan didominasi oleh mereka yang bekerja sendiri atau tidak memiliki karyawan yakni sebanyak 30 orang (81,08%), yang memiliki karyawan hanya 7 orang (18,92%).

Aspek penting laninnya yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik UMKM adalah kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian memiliki kekayaan bersih di bawah Rp50.000.000,00. Bahkan ditemukan beberapa informan memiliki kekayaan bersih yang hanya Rp500.000,00. Ini berarti bahwa sesuai kriteria UU No 20 Tahun 2008, seluruh informan yang diwawancarai dalam penelitian ini tergolong pada usaha mikro.

Aspek lainya adalah aksesibilitas para pengusaha kepada perbankan dalam rangka pembiayaan usaha mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan belum memiliki akses kepada perbankan.

Tabel 4.12
Keadaan Informan Menurut Aksesibilitas Bank

NO.	Aksesibilitas Bank	JUMLAH	%
1	Memiliki Akses	21	56,76
2	Tidak Memiliki Akses	16	43,24
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan dalam diagram pada halaman berikut.

Gambar 4.14

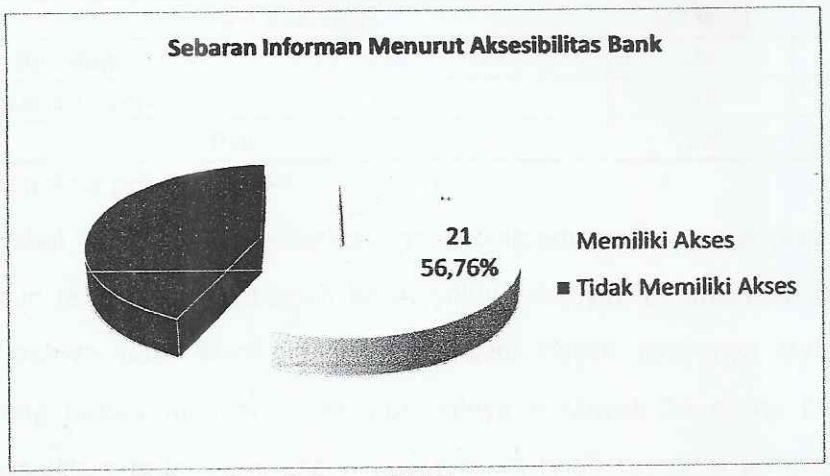

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Data diagram tersebut menunjukkan bahwa informan penelitian didominasi oleh mereka yang tidak memilik akses ke bank yakni sebanyak 21 orang (56,76%), yang memiliki akses ke bank hanya 16 orang (43,24%).

Jumlah pinjaman bank yang pernah dilakukan oleh para informan yang memiliki akses ke bank berkisar antara Rp.5.000.000,00 s/d Rp120.000.000.00. Jumlah angsuran yang disetor sesuai besar pinjaman yang dilakukan berkisar antara Rp.400.000,00 s/d Rp2.400.000,00 perbulan. Seluruh informan mampu dan lancar dalam menunaikan tanggung jawabnya tersebut.

Aspek lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan UMKM adalah besarnya omset setiap pengusaha. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa omset atau hasil penjualan per tahun para informan rata-rata berada di bawah Rp.100.000.000,00 yakni yang tertinggi sebesar Rp84.000.000,00 dan yang terrendah hanya Rp1.200.000,00.

Aspek berikutnya terkait permasalahan UMKM adalah ketetapan dalam jenis komoditi yang menjadi obyek usaha dan ketetapan tempat usahanya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa jenis barang/komoditi yang dijual sudah menetap. Secara umum stabilitas jenis komoditi yang menjadi obyek usaha para informan divisualisakan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Sebaran Informan Menurut Stabilitas Komoditi Usahanya

NO.	Stabilitas Komoditi	JUMLAH	%
1	Komoditi tetap	23	62,16
2	Komoditi berganti	14	37,84
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram berikut. Dari diagram tersebut nampak dengan jelas bahwa sebagian besar yakni sebanyak 23 informan (62,16%) yang menyatakan bahwa jenis komoditi yang menjadi obyek usahanya sudah menetap, sedangkan yang belum menetap jenis komodinya sebanyak 14 orang (37,84%). Data lainnya menunjukkan pula bahwa seluruh informan telah memiliki tempat usaha yang menetap.

Gambar 4.15

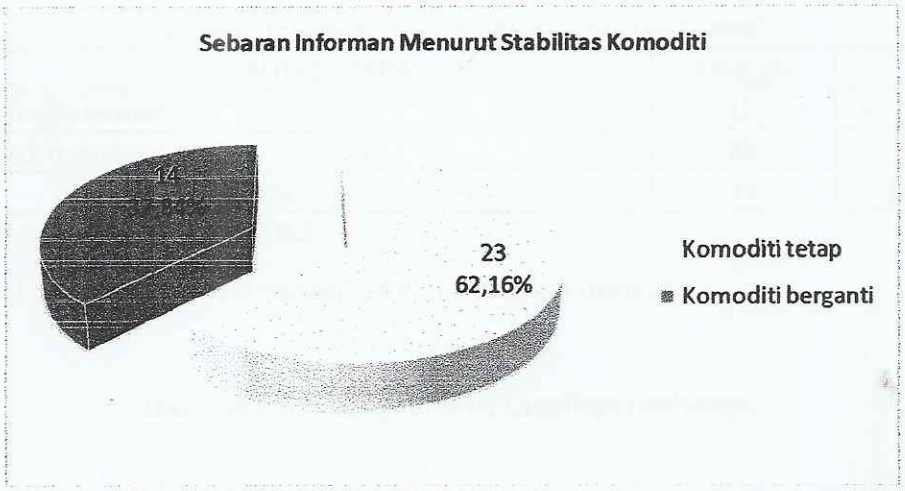

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Aspek lainnya adalah penyelenggaraan administrasi dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, serta manajemen organisasi usaha yang teratur dan modern. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata informan belum menyelenggarakan administrasi dan manajemen keuangan dalam usahanya. Hanya ada satu informan yang menyelenggarakan administrasi dan manajemen keuangan.

Data lainnya menunjukkan pula bahwa Pada umumnya para informan belum memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Hanya ada 5 orang (13,51%) yang menyatakan telah memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, akan tetapi belum didukung oleh manajemen keuangan yang baik karena semuanya menyatakan belum menerapkan sistem akuntansi dan belum membuat neraca usaha.

Hasil wawancara menunjukkan pula bahwa sebagian besar informan belum melakukan manajemen dan organisasi usaha dengan baik. Belum ada pembagian tugas dalam pengelolaan usahanya, karena memang sebagian besar belum memiliki karyawan dan hanya bekerja sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan pula bahwa sebagian besar para informan belum melakukan atau memenuhi aturan perburuhan. Selain itu, sebagian besar informan menyatakan belum memiliki legalitas usahanya, sebagimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14

Sebaran Informan Menurut Legalitas Usahanya

NO.	LEGALITAS USAHA	JUMLAH	%
1	Memiliki perizinan	11	29,73
2	Tidak memiliki perizinan	28	75,68
TOTAL		39	105,41

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.16

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan yakni sebanyak 27 orang (72,97%) tidak memiliki perizinan dalam usahanya, dan hanya 10 orang (27,03%) informan yang memiliki izin. Perizinan yang dimiliki pada umumnya berupa izin tempat usaha dan NPWP.

Dari segi perputaran usaha (*turn over*), sebagian besar informan menyatakan memiliki perputaran usaha yang rendah.

Tabel 4.15

Sebaran Informan Menurut Perputaran Usahanya

NO.	PERPUTARAN USAHA	JUMLAH	%
1	Tinggi	2	5,41
2	Sedang	6	16,22
3	Rendah	29	78,38
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas divisualisasikan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.17

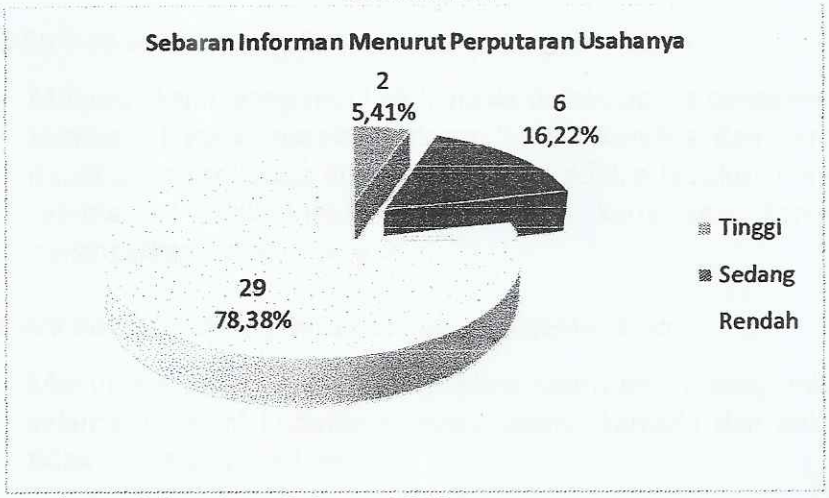

Sumber: Olahan Data Primer, 2013

Data di atas menunjukkan bahwa informan penelitian didominasi oleh mereka yang menyatakan memiliki perputaran usaha yang rendah yakni sebanyak 29 orang (78,38%), disusul yang memiliki perputaran usaha sedang sebanyak 6 orang (16,22%). Informan yang menyatakan memiliki perputaran usaha yang tinggi hanya 2 orang (5,41%).

Data lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian belum melakukan manajemen usaha dengan baik, dan belum melakukan perencanaan bisnis (*business planning*) dalam usahanya. Memahami kelemahan-kelemahannya, para informan seluruhnya menyatakan akan bersedia menerima jika ada program pembimbingan dari pihak-pihak yang berkompeten.

4.2.2 Permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo dalam upaya pengembangannya

Dalam upaya mengidentifikasi permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo, terlebih dahulu dipaparkan data temuan lapangan terkait dengan karakteristik UMKM tersebut berupa pernyataan beberapa informan penelitian yang sempat diwawancarai terkait obyek penelitian tersebut, yakni sebagai berikut.

Bapak Avian Pomalango, 26 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan kami selama ini ialah lambatnya perputaran modal. Peran Pemerintah selama ini

cukup mendukung. Harapan kami agar pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM lebih memperhatikan pengusaha.

Bapak Amir saleh, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni masalah jaringan bisnis. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi sulit bisa diatasi, sepertinya tidak ada solusi. Peran Pemerintah selama ini tidak Mendukung. harapan kami agar Pemerintah dapat melancarkan jaringan yang ada.

Bapak Arif Bolio, 58 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni kurangnya modal usaha, kendala dan permasalahan itu tidak mungkin diatasi sendiri.

Ibu Erni Adam, 33 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Harapan kami agar ada perhatian dari pemerintah, agar dipermudah dalam pengurusan izin usaha.

Ibu Fatma G. duda, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni Utang pelanggan yang menumpuk. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara dipermudah dalam meminjam uang di bank dan koperasi secara mingguan. Peran Pemerintah selama ini yakni belum ada. Harapan kami agar pemerintah ada perhatian terhadap kondisi usaha UMKM.

Bapak Firda Duda, 50 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni lambatnya perputaran modal. Pemerintah selama ini kurang memperhatikan usah-usaha kecil seperti ini. Harapan kami agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan tentang kewirausahaan dan cara berwirausaha.

Ibu Hayati Yusuf, 38 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni lemahnya daya beli konsumen. Belum ada perhatian dari pemerintah setempat.

Bapak Herman Saleh, 38 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni kecilnya area sehingga menyulitkan dalam perluasan usaha warung/rumah makan. Belum ada dukungan dari pihak pemerintah. Harapan kami agar pemerintah harus membantu pengusaha UMKM.

Ibu Hj. Erni Monoarfa, 64 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni lemahnya daya beli konsumen. Sementara perhatian dari pemerintah setempat masih kurang nampak.

Bapak Irawanto Tarera, 36 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni kerusakan mesin, Harapan kami agar ada perhatian dari pemerintah, agar dipermudah dalam pengurusan izin usaha.

Ibu Isma ladiku, 35 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni Utang pelanggan yang menumpuk. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara dipermudah dalam meminjam uang di bank. Peran Pemerintah selama ini yakni belum ada. Harapan kami agar pemerintah ada perhatian terhadap kondisi usaha UMKM.

Ibu Jasni saleh, 29 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni perputaran modal sangat lambat, peran Pemerintah selama ini cukup mendukung. Harapan kami agar pemerintah bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Ibu Maemunah Suleman, 32 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Harapan kami agar ada perhatian dari pemerintah dan menyediakan Tempat untuk berdagang, agar dipermudah dalam pengurusan izin usaha dan mendukung kegiatan usaha ini.

Bapak Rahmat Saleh, 25 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni harga yang tidak stabil dan selalu berubah. Harapan kami agar kiranya pemerintah memperhatikan orang-orang seperti kami. Peran Pemerintah selama ini yakni tidak ada. Pemerintah dalam rangka

pengembangan UMKM harus memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang memiliki usaha kecil seperti kami dengan terjun langsung ke masyarakat untuk menilai kelayakan usaha kami.

Ibu Salma Abdurahman, 65 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Harapan kami dalam rangka pengembangan UMKM agar ada perhatian dari pemerintah, dan dipermudah dalam pengurusan izin usaha.

Bapak Sance Husain, 29 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni Kurangnya daya beli sehingga modal lambat berputar. Pemerintah selama ini masih kurang perhatianya terhadap pengusaha kecil. Dalam rangka pengembangan UMKM agar ada perhatian lebih dari pemerintah, agar dipermudah dalam pengurusan izin usaha.

Ibu Santi Abdullah, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni minimnya daya beli konsumen dan lebih memilih untuk hutang. Belum ada dukungan pemerintah daerah. Harapan kami terhadap pemerintah agar memperhatikan masyarakat miskin.

Ibu Sartin Kasin, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Kendala utama dalam upaya pengembangan UMKM selama ini ialah harga barang yang tidak stabil dan selalu berubah. Harapan kami kiranya pemerintah dapat memperhatikan orang-orang seperti kami. Peran Pemerintah selama ini belum terlihat. Pemerintah harusnya dapat memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang memiliki usaha kecil seperti kami, dan terjun langsung ke masyarakat untuk menilai perkembangan usaha kami.

Ibu Suarni Tialo, 42 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni modal yang sangat terbatas, Harapan kami, agar ada perhatian dari pemerintah, dipermudah dalam pengurusan izin usaha.

Bapak Sudirman Tambiyo, 30 Tahun, Desa potanga, mengemukakan:

Dalam rangka pengembangan UMKM kiranya pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kondisi UMKM, dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha.

Bapak Tanwir Mapato, 45 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Permasalahan dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni perputaran modal sangat lambat. Peran Pemerintah selama ini sudah cukup mendukung. Harapan kami agar pemerintah bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Ibu Yanti Adam, 30 tahun, Desa potanga, mengemukakan:

> Perhatian dari pemerintah sangat diharapkan dan kiranya dapat menyediakan tempat untuk berdagang, agar dipermudah dalam pengurusan izin usaha dan mendukung kegiatan usaha ini.

Bapak Ajan Ali, 33 tahun, Desa botumoito, antara lain mengemukakan:

> Yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses pengembangan jaringan bisnis melemah karena adanya persaingan dari warga lain. Menurut kami kendala dan permasalahan ini dapat di atasi, dengan cara mengadakan penambahan barang dan renovasi tata ruang tempat usaha/kios biar lebih menarik. Peran pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan masalah yang terjadi saat ini yaitu masalah usaha warga desa. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM agar lebih memperhatikan usaha-usaha yang ada di desa yang jauh dari jangkauan pemerintah.

Bapak Amir Usman, 45 tahun, Tilamuta, antara lain mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis yang ada kurang berkembang. Menurut kami, kendala dan permasalahan itu dapat diatasi, dengan cara pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Peran pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan dan terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami terhadap pemerintah agar memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memperhatikan usaha di desa-desa yang jauh dari jangkauan pemerintah. Yang harus dilakukan atau diadakan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengembangan UMKM antara lain memberikan pelatihan dan memantau/mengevaluasi peningkatan pendapatan pengusaha.

Bapak H. Naki, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses pengembangan jaringan bisnis kurang memadai. Permasalahan itu dapat diatasi melalui pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Peran pemerintah selama ini

masih kurang terutama perhatiannya terhadap UMKM. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM kiranya dapat memberikan solusi bagaimana UMKM dapat lebih produktif, memperhatikan usaha desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, memberikan pelatihan dan memantau/mengevaluasi peningkatan produktivitas UMKM.

Bapak Hadju saipi, 36 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini akses pengembangan jaringan bisnis, produk susah untuk dipasarkan, dan kendala lainnya yaitu masalah pengembangan usaha. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara mengadakan perluasan jaringan bisnis untuk supya bisnis bisa berjalan dengan baik. Peran pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan masalah yang terjadi saat ini yaitu masalah usaha warga desa. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM yakni agar lebih memperhatikan usaha usaha yang ada di desa yang jauh dari jangkauan pemerintah.

Bapak Kadir Saipi, 37 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami, kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini ialah kurangnya pelanggan dan banyak Pesaing. Kendala dan permasalahan itu dapat di atasi dengan cara memperbanyak jenis barang/makanan. Peran pemerintah selama ini belum ada. Harapan kami agar Pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi UMKM yang ada, meningkatkan hasil produksi, memberikan pelatihan kepada pengusaha UMKM agar mereka bisa mengelola usahanya.

Bapak Martin Abdul, 37 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis kurang berkembang. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Peran pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan dan terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM agar memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memperhatikan usaha desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, memberikan solusi dan selalu memperhatikan UMKM Langsung pada masyarakat.

Bapak Muhammad Ali, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, apakah yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses pengembangan jaringan bisnis kurang memadai. Kendala dan permasalahan itu dapat di atasi dengan cara pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Peran pemerintah selama ini masih kurang perhatian terhadap masyarakat pelaku usaha. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM agar memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memperhatikan usaha di desa-desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, dan memberikan pelatihan dan memantau peningkatan pengusaha UMKM.

Ibu Ratna Akuba, 50 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yakni kurangnya pelanggan dan pengembangan jenis usaha. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan jalan meminta bantuan aparat pemerintah dalam memediasi pengembangannya. Peran pemerintah selama ini belum ada. Harapan kami agar Pemerintah turun langsung melihat kondisi UMKM yang ada, meningkatkan hasil produksi, memberikan pelatihan kepada pengusaha dan memantau hasil usahanya.

Bapak Ridwan Dahiba, 35 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini adalah pengembangan jaringan Bisnis yang masih kurang. Kendala dan permasalahan itu dapat di atasi dengan cara pemerintah harus mengadakan sosialisasi atau bimbingan mengenai pengembangan UMKM. Pemerintah selama masih kurang memperhatikan pengembangan UMKM. Harapan kami agar pemerintah perlu memperhatikan adanya pengelolaan UMKM, perlu diterapkan sosialisasi tentang pengelolaan UMKM.

Bapak Juma Pomalingo, 42 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini ialah lemahnya pengembangan jaringan Bisnis. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara sosialisasi. Peran pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan pengembangan UMKM. Apakah kami agar pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan UMKM.

Bapak Rinto Adam, 40 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis kurang berkembang. Kendala dan

permasalahan itu dapat diatasi dengan cara peningkatan pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Peran pemerintah selama masih kurang memperhatikan dan belum terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami agar pemerintah dalam rangka pengembangan dapat memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memperhatikan usaha desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, memberikan pelatihan dan memantau/ mengevaluasi peningkatan UMKM.

Ibu Rusni, 45 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis kurang berkembang. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara peningkatan pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan dan belum terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami agar pemerintah dapat memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memperhatikan usaha di desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, dan memberikan pelatihan dan memantau peningkatan UMKM.

Bapak Umar Ibrahim, 34 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis kurang berkembang. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara peningkatan pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringannya. Pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan dan terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami terhadap pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM agar dapat memberikan solusi agar UMKM dapat lebih produktif, memperhatikan UMKM di desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, memberikan pelatihan dan memantau peningkatan UMKM.

Ibu Yayun Lumula, 40 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan UMKM selama ini yaitu akses jaringan bisnis kurang berkembang. Kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara peningkatan pengelolaan administrasi, promosi dan pemasaran yang meluas jaringan bisnis. Pemerintah selama ini masih kurang memperhatikan dan belum terjun langsung memantau masalah pengembangan UMKM. Harapan kami agar pemerintah dapat memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, memberikan pelatihan dan memantau peningkatan UMKM.

Bapak Zainudin Pomalingo, 25 tahun, Desa Botumoito, mengemukakan:

> Menurut kami, yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan selama ini ialah kurangnya pelanggan dan banyak Pesaing, kendala dan permasalahan itu dapat diatasi dengan cara memperbanyak jenis makanan yang dijual. Peran pemerintah selama ini belum ada. Harapan kami agar pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi UMKM yang ada, meningkatkan hasil produksi, memberikan pelatihan kepada pengusaha agar mereka mengetahui cara mengelola usahanya.

Dari data hasil wawancara dengan informan penelitian, teridentifikasi sedikitnya 10 permasalahan yang dirasakan dan dikeluhkan masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo, sebagaimana divisualisasikan tabel berikut. Dari data tersebut nampak bahwa paling banyak informan, yakni 13 orang (35,13%) mengeluhkan akses jaringan bisnis yang kurang berkembang, disusul informan yang mengeluhkan lemahnya daya beli konsumen sebanyak 7 orang (18,92%). Sementara informan yang mengeluhkan tentang harga yang tidak stabil dan selalu berubah, serta perputaran modal sangat lambat masing-masing sebanyak 3 orang (8,11%).

Tabel 4.16
Permasalahan UMKM Menurut Informan Penelitian

NO.	MASALAH	JUMLAH	%
1	Jaringan bisnis kurang berkembang	13	35,14
2	Lemahnya daya beli konsumen	7	18,92
3	Perputaran modal sangat lambat	3	8,11
4	Harga yang tidak stabil dan selalu berubah	3	8,11
5	Kurangnya modal usaha	2	5,41
6	Kurangnya pelanggan	2	5,41
7	Utang pelanggan yang menumpuk	2	5,41
8	Banyaknya pesaing	2	5,41
9	Kecilnya area tempat usaha rumah makan	2	5,41
10	Kerusakan mesin	1	2,70
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Selanjutnya informan yang mengeluhkan tentang kurangnya modal, kurangnya pelanggan, lambatnya perputaran modal, utang pelanggan yang menumpuk, banyaknya

pesaing, dan kecilnya area tempat usaha, masing-masing sebanyak 2 orang (5,41%). Informan yang mengeluhkan masalah kerusakan mesin usahanya, hanya 1 orang (2,70%).

Gambar 4.18

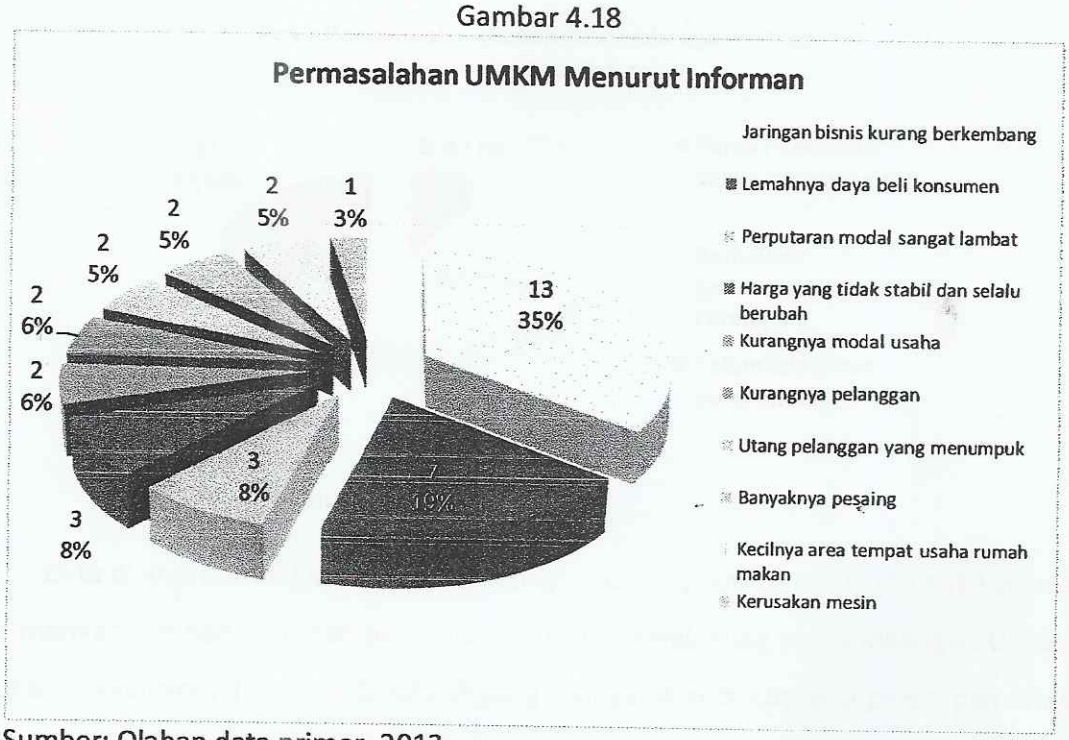

Sumber: Olahan data primer, 2013

Fenomena lainnya yang sangat menarik dari data hasil temuan lapangan ialah persepsi para informan tentang peran dan perhatian pemerintah terhadap kondisi perkembangan UMKM. Ditemukan adanya informan yang menyatakan bahwa peran pemerintah sudah cukup mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo, di samping informan yang menyatakan bahwa peran dan perhatian pemerintah masih kurang mendukung, bahkan ada yang menyatakan belum ada peran pemerintah selama ini terhadap pengembangan UMKM.

Tabel 4.17

Peran Pemerintah terhadap Pengembangan UMKM Menurut Persepsi Informan

NO.	PERAN PEMERINTAH MENURUT INFORMAN	JUMLAH	%
1	Peran Pemerintah cukup mendukung	3	8,11
2	Perhatian pemerintah masih kurang	22	59,46
3	Belum ada peran pemerintah	12	32,43
TOTAL		37	100,00

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data tabel di atas dapat divisualisasikan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.19

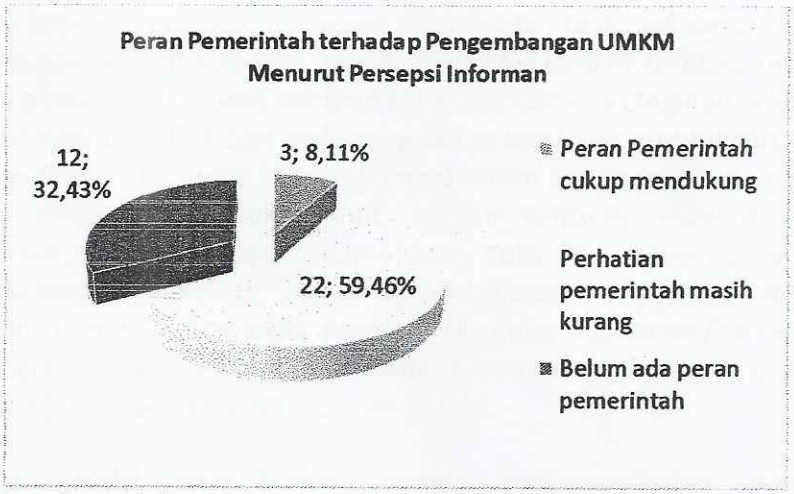

Sumber: Olahan data primer, 2013

Data di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar yakni 22 orang (59,46%) informan yang menyatakan bahwa peran pemerintah kurang mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo, 12 orang (32,43%) yang menyatakan belum ada peran pemerintah, dan hanya 3 orang (8,11%) yang menyatakan peran pemerintah cukup mendukung.

Pernyataan para informan tersebut tidaklah serta merta menjadi indikasi kurangnya peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM di daerah ini. Persepsi negatif seperti dapat saja terjadi sebagai akibat kurangnya akses informasi masyarakat tentang peran pemerintah selama ini. Sehubungan dengan hal ini Asisten I Setda Kabupaten Boalemo (FGD, 22 Oktober 2013) mengemukakan:

> Dalam kajian ini perlu ada pemisahan program pemerintah pusat dan daerah. Saya kurang setuju perhatian pemerintah kurang terhadap UMKM. Buktinya Pak Bupati memberikan motivasi masyarakat untuk berusaha seperti berkebun kakao, dll.

Pernyataan informan di atas menunjukkan adanya perhatian dan peran pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap UMKM di Kabupaten Boalemo. Akan tetapi informasi tentang peran-peran pemerintah tersebut kurang diakses atau tidak diartikulasikan oleh masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pelaku usaha.

Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si (FGD, 22 Oktober 2013) antara lain mengemukakan:

> Masalah kebiasaan pola pikir tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah harus lebih dibudayakan di kalangan masyarakat. Masyarakat terbiasa dengan bantuan-bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai. Keinginan orang sangat besar untuk memperoleh BLT dari pada yang benar-benar membutuhkan. Sekarang yang dilakukan Pemda Boalemo langsung memberikan bibit kepada yang memiliki lahan. Nelayan dibantu alat bukan duit, namun langsung diawasi. Raskin kurang bermanfaat maka diputuskan (dihentikan). Kube (kelompok Usaha Bersama) juga harus dievaluasi. 4 milliar sudah beredar kepada masyarakat melalui lembaga keuangan. Pemda Fokus pada program unggulan Perikanan/kelautan, pariwisata dan program-program tambahan. Akan ada investor Erwin Angsa Group untuk usaha Silo (pengepakan semen: semen curah).

Pernyataan Wakil Bupati Boalemo tersebut menggambarkan adanya peran dan upaya pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM di daerah ini. Bentuk peran pemerintah seperti ini seharusnya dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Bahwa bentuk perhatian seharus bukan dalam bentuk pemberian uang yang sifatnya cenderung kurang mendidik dan kurang memotivasi etos kerja masyarakat agar lebih produktif dalam berusaha bahkan sebaliknya semakin konsumtif.

Sekretaris Bappeda Setda Boalemo (FGD, 22 Oktober 2013) mengemukakan:

> Ternyata angka kemiskinan tidak berkurang secara signifikan yang terbagi dalam cluster. Seharusnya yang diberikan BLT hanya bagi mereka yang tidak dapat melakukan apa-apa. Terkait dengan teori 2%, yang sangat berpengaruh sebetulnya dalam pembangunan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (*governance expenditure*).

Pernyataan diatas mengindikasikan minimnya manfaat program BLT bagi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boalemo. Penerapan program BLT tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di daerah ini. Oleh karenanya, program bantuan dalam bentuk bahan atau alat bagi pelaku usaha yang digalakkan oleh Pemda Boalemo sekarang ini seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat pelaku usaha.

Hal penting lainnya yang harus dideskripsikan di sini, terkait dengan identifikasi permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo, ialah harapan-harapan yang dinyatakan oleh

para informan penelitian selaku pelaku usaha terhadap pemerintah, dalam upaya pengembangan UMKM di wilayah ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan, sedikitnya 14 harapan atau saran yang diajukan para pelaku usaha terhadap pemerintah yakni: (1) Memperhatikan masyarakat miskin, (2) Membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, (3) Memberikan perhatian penuh terhadap kondisi UMKM, (4) Membantu pengembangan UMKM, (5) Turun langsung untuk melihat kondisi UMKM, (6) Menyediakan tempat untuk berdagang, (6) Mempermudah dalam pengurusan izin usaha, (8) Memberikan penyuluhan tentang kewirausahaan dan cara berwirausaha, (9) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengusaha agar mereka mengetahui cara mengelola usahanya, (10) Memberikan solusi agar UMKM dapat produktif, (11) Memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan UMKM, (12) Memantau dan mengevaluasi peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM, (13) Memperhatikan usaha di desa yang jauh dari jangkauan pemerintah, dan (14) Kemudahan dalam meminjam uang di bank.

Jika ditelaah lebih mendalam saran dan harapan-harapan para pelaku usaha tersebut, bisa diidentifikasi beberapa masalah lainnya selain masalah-masalah UMKM yang telah dipaparkan sebelumnya. Masalah-masalah tersebut antara lain:

(1). Minimnya informasi masyarakat tentang peran pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM.
(2). Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
(3). Kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan tempat untuk berdagang.
(4). Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha.
(5). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha.
(6). Rendahnya produktifitas.
(7). Minimnya informasi masyarakat tentang perbankan.

Permasalahan-permasalahan UMKM sebagaimana telah dideskripsikan perlu dikaji secara lebih cermat lagi guna pencarian alternatif pemecahan dan penyelesaiannya, sehingga diperoleh langkah strategis yang tepat dan akurat guna pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Boalemo ke depan nanti.

4.2.3 Langkah strategis upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Boalemo

Pada bagian ini akan dideskripsikan tahapan-tahapan pemecahan dan penyelesaian permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo yang telah teridentifikasi di lapangan, yang pada gilirannya akan menghasilkan output berupa penentuan langkah strategis yang dapat diambil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah ini.

Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada langkah penyelesaian masalah menurut John Dewei (Mahmud,2013) adalah sebagai berikut:

(1) Merumuskan dan menegaskan masalah
(2) Mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis
(3) Mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan
(4) Mengadakan pengujian alternatif yang dipilih

Dengan demikian, langkah pertama yang dilakukan yakni merumuskan dan menegaskan masalah UMKM berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Pada bagian sebelumnya telah dideskripsikan masalah UMKM dan harapan-harapan pelaku usaha yang teridentifikasi di lapangan. Berdasarkan masalah dan harapan yang pelaku usaha sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka teridentifiaksi sedikitnya sebanyak 17 permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo yang harus dicari langkah pemecahan dan penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

(1) Jaringan bisnis yang kurang berkembang,
(2) Kurangnya modal usaha,
(3) Kurangnya pelanggan,
(4) Perputaran modal sangat lambat,
(5) Utang pelanggan yang semakin menumpuk,
(6) Lemahnya daya beli konsumen,
(7) Harga yang tidak stabil dan selalu berubah,
(8) Banyaknya pesaing,
(9) Kecilnya area tempat usaha,

(10) Kerusakan mesin usaha,

(11) Minimnya informasi masyarakat tentang peran pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM

(12) Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usahanya,

(13) Kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan tempat untuk berdagang/berusaha,

(14) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha,

(15) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha,

(16) Rendahnya produktifitas,

(17) Minimnya informasi masyarakat tentang perbankan.

Guna mencari langkah startegis penanggulangan permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo sebagaimana dipaparkan di atas, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan merumuskan serta menetapkan akar permasalahan di antara permasalahan-permasalahan yang ada.

Jika dianalisis secara mendalam, dari 17 permasalahan yang diuraikan di atas teridentifikasi sebanyak 7 akar permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya dalam rangka pengembangan dan pemberdayan UMKM di Kabupaten Boalemo. Adapun yang menjadi akar permasalahan dimaksud antara lain:

(1) Minimnya informasi masyarakat tentang peran pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM.

(2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha.

(3) Minimnya etos kerja masyarakat dalam bekerja dan berusaha (budaya tidur siang, cepat puas atau pasrah dengan hasil yang ada).

(4) Minimnya akses pasar yang selama ini hanya mengandalkan pasar lokal.

(5) Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha.

(6) Kurangnya modal usaha.

(7) Minimnya informasi masyarakat tentang perbankan.

Permasalahan-permasalahan lainnya bukanlah merupakan akar permasalahan melainkan permasalahan sebagai akibat dari akar permasalahan yang ada. Sebagai contoh: masalah jaringan bisnis yang kurang berkembang, kecilnya area tempat usaha, harga yang tidak stabil dan selalu berubah, utang pelanggan yang semakin menumpuk, kurangnya pelanggan, banyaknya pesaing, merupakan masalah yang dirasakan oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha, kurangnya modal usaha dan sebagainya.

Bertolak dari 7 akar permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan UMKM di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran dan program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM melalui kegiatan sosialisasi,

(2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha, termasuk dalam pengurusan perizinan dan perpajakan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

(3) Meningkatkan etos kerja masyarakat dalam bekerja dan berusaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

(4) Perluasan jaringan bisnis dan akses pasar baik domestik maupun ekspor melalui pembinaan kualitas komoditi unggulan baik di bidang pertanian/perkebunan maupun perikanan/kelautan.

(5) Meningkatkan program bantuan modal usaha bagi UMKM terutama usaha mikro.

(6) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan/ perkreditan melalui sosialisasi oleh pihak terkait.

4.2.4 Konstruksi model pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo

Selain alternatif langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, upaya konstruksi model pengembangan UMKM juga harus didasarkan pada faktor-faktor pendukung yang menjamin efektivitas pelaksanan program pengembangan tersebut. Faktor-faktor

pendukung yang dimiliki daerah guna mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo antara lain:

(1) Kebijakan Pemerintah yang mendukung
(2) Potensi wilayah; SDM, SDA, Infrastruktur
(3) Pengusaha/Swasta
(4) Lembaga perkreditan baik bank maupun non bank.
(5) Pihak Perguruan Tinggi

Berdasarkan langkah-langkah strategis yang telah dikemukakan sebelumnya serta faktor-faktor pendukung yang ada, maka upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Boalemo dapat ditempuh melalui program-program sebagai berikut:

(1) Sosialisasi tentang program-program pemerintah terkait pengembangan dan pemberdayaan UMKM melibatkan instansi-instansi terkait (Bappeda, Dinas Koperindag, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan).
(2) Pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha bagi UMKM melibatkan Perguruan Tinggi yang ada.
(3) Sosialisasi tentang pengurusan izin usaha, melibatkan dinas terkait dengan urusan perizinan usaha.
(4) Peningkatan program bantuan modal usaha bagi UMKM terutama usaha mikro, melibatkan instansi terkait (Bappeda, lembaga keuangan bank maupun non bank).
(5) Sosialisasi lembaga perkreditan bagi pelaku UMKM melibatkan lembaga keuangan bank maupun non bank.
(6) Memfasilitasi tumbuhnya sentra dan jenis usaha baru terutama di bidang pertanian/peternakan dan perikanan/kelautan melibatkan instansi terkait (Bappeda, Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Bank, PT).

Hubungan dan alur kerja komponen pengembangan UMKM tersebut digambarkan pada diagram halaman berikut.

Peran Instansi Terkait

Peran lembaga/instansi terkait (Bappeda, Dinas Koperindag, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan, perbankan) dalam model pengambangan UMKM sebagimana digambarkan di atas antara lain:

(1) Sosialisasi tentang program-program pemerintah terkait pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

(2) Peningkatan program bantuan modal usaha bagi UMKM terutama usaha mikro.

(3) Sosialisasi tentang prosedur pengurusan izin usaha.

(4) Sosialisasi lembaga perkreditan bagi pelaku UMKM.

(5) Memfasilitasi tumbuhnya sentra dan jenis usaha baru terutama di bidang pertanian/peternakan dan perikanan/kelautan.

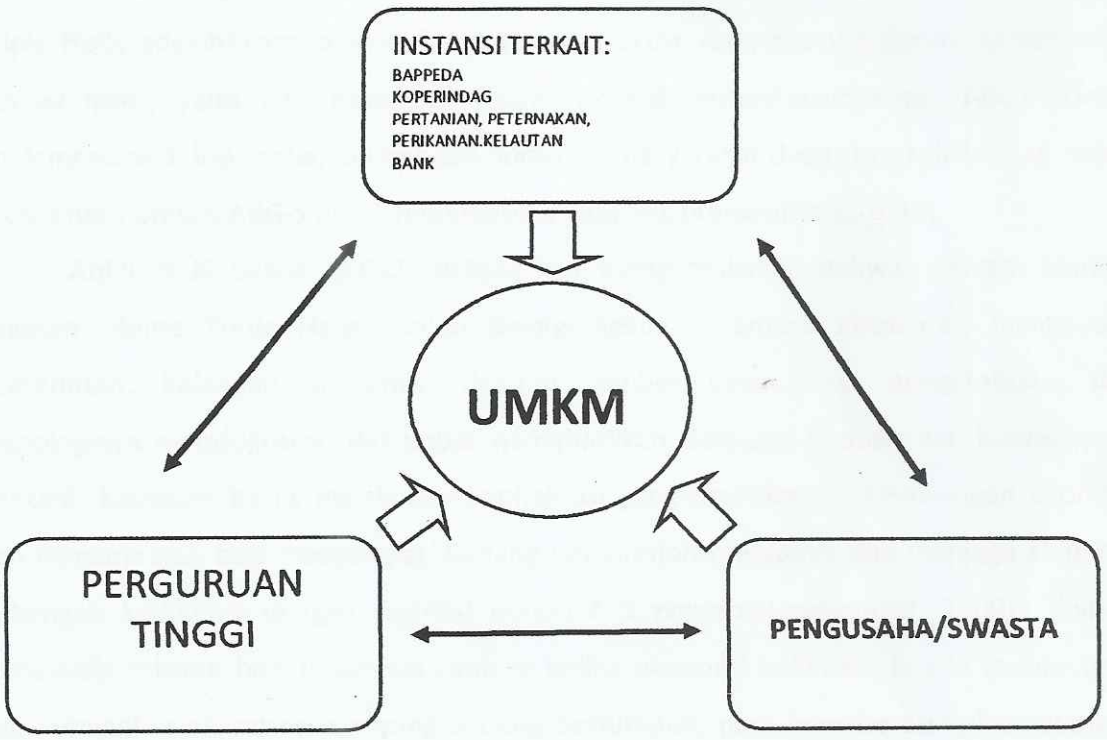

Gambar 4.20

Model pengembangan UMKM yang ditawarkan

Peran Pengusaha/Swasta

Yang dimaksudkan dengan pengusaha pada model ini adalah pengusaha besar (UB) baik lokal maupun luar daerah bahkan luar negeri yang tertarik untuk bersinergi dalam program ini, baik dalam hal investasi maupun perluasan jaringan pasar terutama pasar ekspor.

Peran Perguruan Tinggi

Peran Perguruan Tinggi terkait dengan peningkatan dan pengembangan SDM yang mendukung perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui penciptaan lapangan kerja baru. Kegiatan yang dapat dilakukan secara riil antara lain pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha serta penerapan IPTEK dalam berbisnis bagi pengusaha UMKM dan calon pengusaha.

Model yang direkomendasikan ini diadopsi dari model Tripel Helix. Pengertian Triple Helix adalah konsep sinergi antara aktor-aktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi Iptek, yaitu dari kalangan *Academicians-Business-Governments* (ABG). Untuk implementasi di Indonesia, diharapkan *Society* – masyarakat dapat turut dilibatkan dalam proses harmonisasi ABG-S untuk menghasilkan inovasi. (Kemenristek, 2012)

Anindya N Bakrie, (2012) antara lain mengemukakan bahwa sebagai konsep, gagasan utama Triple Helix adalah sinergi kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif (Etzkowitz&Leydesdorff, 2000). Konsep triple helix relevan bagi Indonesia saat ini ketika ekonomi Indonesia begitu menjanjikan dan menjadi salah satu pasar yang sedang bertumbuh, para investor asing berdatangan ingin menanamkan modal.

4.3 Pembahasan

Sebagaimana telah ditetapkan di awal penelitian ini, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui karakteristik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo, (2) Mengetahui akar permasalahan yang menjadi kendala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo dalam upaya pengembangannya, (3) Mengetahui langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo, dan (4) Menemukan konstruksi model pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Boalemo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Beberapa aspek, secara umum digunakan untuk meninjau karakteristik UMKM, yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Usia pelaku usaha, (2) Aspek berikutnya adalah Jenis/bidang usaha yang digeluti para pelaku usaha, (3) Status kepemilikan usaha, (4) Latar belakang pendidikan, (5) Jiwa wirausaha dan pengalaman berusaha/berwira usaha, (6) Keterlibatan sumber daya manusia (karyawan) yang terlatih dan terdidik dalam usahanya, (7) Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (8) Aksesibilitas kepada perbankan dalam rangka pembiayaan usaha mereka, (9) Besarnya omset, (10) Ketetapan/stabilitas dalam jenis komoditi yang menjadi obyek usaha dan ketetapan tempat usahanya, (11) Penyelenggaraan administrasi dan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, serta manajemen organisasi Usaha yang teratur dan modern, (12) Melakukan manajemen dan organisasi usaha, (13) Melakukan atau memenuhi aturan perburuhan, (14) Memiliki legalitas usahanya, dan (15) Perputaran usaha (*turn over*),

Dengan menggunakan aspek-aspek tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo (yang berhasil diwawancarai) adalah sebagai berikut:

(1) Pada umumnya terdiri dari kelompok usia produktif yakni berkisar pada usia 25 s/d 44 Tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di

Kabupaten Boalemo jika ditinjau dari tingkat usia, sangat potensial untuk lebih ditingkatkan.

(2) Pada umumnya sebagai pemilik usaha.

(3) Pada umumnya belum memiliki badan usaha.

(4) Paling banyak memiliki latar belakang pendidikan SMP.

(5) Memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

(6) Memiliki pengalaman wirausaha yang memadai, berkisar 5 s/d 10 tahun.

(7) Rata-rata para pelaku usaha mengelola sendiri usahanya tanpa dibantu atau mempekerjakan karyawan.

(8) Kekayaan usaha bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, di bawah Rp50.000.000,00.

(9) Pada umumnya belum memiliki akses kepada perbankan.

(10) Omset atau hasil penjualan per tahun rata-rata berada di bawah Rp.100.000.000,00 yakni yang tertinggi sebesar Rp84.000.000,00 dan yang terrendah hanya Rp1.200.000,00.

(11) Jenis barang/komoditi yang dijual pada umumnya sudah menetap, beberapa yang belum menetap.

(12) Pada umumnya telah memiliki tempat usaha yang menetap.

(13) Rata-rata informan belum menyelenggarakan administrasi dan manajemen keuangan dalam usahanya.

(14) Pada umumnya para informan belum memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

(15) Belum melakukan manajemen dan organisasi usaha dengan baik.

(16) Belum ada pembagian tugas dalam pengelolaan usahanya, karena memang sebagian besar belum memiliki karyawan dan hanya bekerja sendiri.

(17) Belum melakukan atau memenuhi aturan perburuhan.

(18) Belum memiliki legalitas usahanya (perizinan).

(19) Pada umumnya memiliki perputaran usaha yang rendah.

Dari karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo tersebut, dapat dilihat bahwa pada umumnya tergolong dalam klasifikasi usaha mikro. Kondisi sangat memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya seperti pengusaha besar (UB) selaku investor, lembaga perkreditan, dan Perguruan Tinggi.

Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terkait bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo pada umumnya bergerak di bidang perdagangan. Untuk bidang industri/kerajinan masih sangat minim. Kondisi ini tentu merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat di wilayah ini.

Hasil penilitian menunjukkan pula berbagai permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Boalemo teridentifikasi sedikitnya 7 akar permasalahan yang harus dicari solusinya dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo, antara lain:

(1) Minimnya informasi masyarakat tentang peran pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM.
(2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha.
(3) Minimnya etos kerja masyarakat dalam bekerja dan berusaha (budaya tidur siang, cepat puas atau pasrah dengan hasil yang ada).
(4) Minimnya akses pasar yang selama ini hanya mengandalkan pasar lokal.
(5) Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha.
(6) Kurangnya modal usaha.
(7) Minimnya informasi masyarakat tentang perbankan.

Untuk memecahkan dan menyelesaikan 7 akar permasalahan tersebut, maka langkah-langkah strategis sebagai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran dan program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM,

(2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha,

(3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha,

(4) Meningkatkan program bantuan modal usaha bagi UMKM terutama usaha mikro,

(5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga perkreditan.

(6) Memfasilitasi masyarakat pelaku usaha yang tidak mampu dalam hal menyediakan tempat untuk berdagang/berusaha, dan

(7) Meningkatkan jenis-jenis usaha yang ada.

Selain mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ada, konstruksi model pengembangan UMKM harus memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang menjamin efektivitas pelaksanaan program pengembangan tersebut. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki daerah guna mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, antara lain: kebijakan pemerintah, instansi terkait, potensi wilayah (SDM, SDA, Infrastruktur), pengusaha/swasta, lembaga perkreditan baik bank maupun non bank, dan pihak Perguruan Tinggi.

Model pengembangan dan pemberdayaan UMKM harus mempu menggambarkan hubungan dan alur kerja berbagai komponen terkait dengan pengembangan UMKM tersebut sebagaimana digambarkan pada gambar 4.20.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

a) Karakteristik UMKM di Kabupaten Boalemo mengindikasikan, bahwa pada umumnya UMKM yang ada di wilayah ini tergolong dalam klasifikasi usaha mikro. Kondisi ini sangat memerlukan perhatian dan dukungan sepenuhnya dari Instansi Pemerintah, maupun pihak terkait lainnya seperti pengusaha besar (UB) selaku investor, lembaga keuangan/perkreditan, dan Perguruan Tinggi.

b) Teridentifikasi 7 akar permasalahan yang harus dicari solusinya dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo, antara lain: (1) Minimnya informasi masyarakat tentang peran pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM. (2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha. (3) Minimnya etos kerja masyarakat dalam bekerja dan berusaha (budaya tidur siang, cepat puas atau pasrah dengan hasil yang ada). (4) Minimnya akses pasar yang selama ini hanya mengandalkan pasar lokal. (5) Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha. (6) Kurangnya modal usaha. (7) Minimnya informasi masyarakat tentang perbankan.

c) Langkah-langkah strategis sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada antara lain: (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran dan program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM melalui kegiatan sosialisasi, (2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan cara mengelola usaha, termasuk dalam pengurusan perizinan dan perpajakan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, (3) Meningkatkan etos kerja masyarakat dalam bekerja dan berusaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, (4) Perluasan jaringan bisnis dan akses pasar baik domestik maupun ekspor melalui pembinaan kualitas komoditi unggulan baik di bidang

pertanian/perkebunan maupun perikanan/kelautan, (5) Meningkatkan program bantuan modal usaha bagi UMKM terutama usaha mikro, dan (6) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan/ perkreditan melalui sosialisasi oleh pihak terkait.

d) Model pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Boalemo harus mampu menggambarkan hubungan dan alur kerja berbagai komponen terkait dengan pengembangan UMKM, seperti Instansi terkait (Bappeda, Koperindag, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan, Lembaga Perkreditan, Perguruan Tinggi).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan UMKM di lapangan, peneliti merekomendasikan:

a) Diperlukan suatu program yang dapat menciptakan lapangan usaha baru di samping meningkatkan usaha-usaha yang ada agar mampu menghasilkan komoditi unggulan daerah, guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah masyarakat, yang tidak hanya mengandalkan pasar lokal tetapi mampu menembus pasar domestik bahkan manca negara, sekaligus menjamin perluasan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat.

b) Model pengembangan UMKM yang disarankan adalah model Tripel Helix yang melibatkan masyarakat atau ABG - S (Academicians-Business-Governments — Society)

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Mirza, 2011, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia: *Sebuah Tinjauan Singkat,* dalam http://percikanrenungan.blogspot.com/2011/07/pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan.html

Anindya N Bakrie, 2012, Triple Helix dan Percepatan Inovasi, dalam http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/11805

Arikunto, S., 2007, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Choeryanto, Syaifoel. Ketidakseimbangan Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Dahlan, Muhamad, 2007, Aliran Diskreasi Dan Peran Penting UMKM, dalam http://greatdepression.wordpress.com/2007/10/21/aliran-diskreasi-dan-peran-penting-UMKM/.

Darmawan, Andreas Adi, 2010, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, dalam http://yudhislibra.wordpress.com/2010/11/22/64/.

Departemen Koperasi dan UKM RI, 2013, UMKM Serap 97 Persen Tenaga Kerja di Indonesia, dalam http://www.depkop.go.id/index.php?option= com content&view=article&id=1281:umkm-serap-97-persen-tenaga-kerja-di-indonesia&catid=50:bind-berita&Itemid=97

Dirlanudin. "Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil." *Jurnal Ilmiah Niagara* 1, no. 2 (2008): 47-67.

Effendi, Sofian, 2001. E-Gov untuk Mendukung Good Governance dan Jaringan Kerja Pemerintahan. Makalah Seminar Nasional Forkom Mahasiswa dan Alumni MAP UGM, Yogyakarta.

Halomoan, Tamba. "Paradigma Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Koridor Otonomi Daerah", dalam http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/halomoan.html.

Hill, Hal. "Small dan Medium Enterprises In Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration." *Asian Survey* XLI, no. 2 (April 2001): 248-270.

Kemeristek RI, 2012, ABG-S Kunci Inovasi IPTEK, dalam http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/11781/print.

Mahmud, 2013, Strategi Pemecahan dan Penyelesaian Masalah, dalam http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/07/strategi-pemecahan-dan-penyelesaian.html.

Manikmas, M. Oka Adnyana. "Potensi Pengembangan UKM Dalam Era Otonomi Daerah." *SOCA* 3, no. 1 (2003): 1-16.

Moleong, L. J., 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

Purnama, Rauf. "Nilai Tambah SDA untuk Kesejahteraan Rakyat", dalam http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rauf-purnama/sda.shtml.

Setyobudi, Andang. "Peran Serta BI Dalam Pengembangan UMKM." *Buletin Hukum dan Kebanksentralan* 5, no. 2 (Agustus 2007): 29-35.

Sugiono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Surakhmad, W., 1985, Dasar dan Teknik Research, CV. Tarsito, Bandung.

Tambunan, T. 1992, The Role of Small Firms in Indonesia; *Small Business Economics* (Springer) 4, no. 1 (March 1992): 59-77.

Tan, Sofyan, 2001, Good Governance di Mata Usaha Kecil Menengah Menyongsong AFTA *2003. Makalah Seminar Nasional Program Pasca Sarjana* MAP UGM, Yogyakarta.

Usman, H. & Akbar, P. S., 2001, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.